

T E S I S

**ANALISIS KEMISKINAN KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2022**

*AN ANALYSIS OF POVERTY OF FEMALE-HEADED
HOUSEHOLDS IN MALUKU PROVINCE IN 2022*

JUMERTI DAUD



**PROGRAM STUDI
MAGISTER SOSIOLOGI KONSENTRASI KEPENDUDUKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**ANALISIS KEMISKINAN KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2022**

*AN ANALYSIS OF POVERTY OF FEMALE-HEADED
HOUSEHOLDS IN MALUKU PROVINCE IN 2022*

TESIS

JUMERTI DAUD

E032221025



**PROGRAM STUDI
MAGISTER SOSIOLOGI KONSENTRASI KEPENDUDUKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**ANALISIS KEMISKINAN KEPALA RUMAH TANGGA
PEREMPUAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2022**

*AN ANALYSIS OF POVERTY OF FEMALE-HEADED
HOUSEHOLDS IN MALUKU PROVINCE IN 2022*

Tesis

Sebagai persyaratan untuk meraih gelar magister

Program Studi

Sosiologi Konsentrasi Kependudukan

Disusun dan diajukan oleh

JUMERTI DAUD

E032221025

Kepada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS KEMISKINAN KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN
DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2022**

Disusun dan diajukan oleh

JUMERTI DAUD

E032221025

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi Konsentrasi Kependudukan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **22 Januari 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



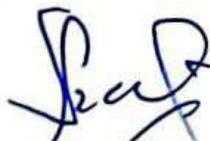
Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA
NIP.19640419 198903 2 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si
NIP. 19680101 199702 2 001

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,



Dr. Sakaria To Anwar, M.Si
NIP.19690130 200604 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP, M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Anallsis Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2022" adalah adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA dan Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jumal (ESTIMASI, Volume 5 No.1) Sebagai Artikel Dengan Judul ***"Analysis of Women's Poverty in Maluku Province."***

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Januari 2024



JUMERTI DAUD

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “**Analisis Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2022.**” Berbagai masalah dan kendala dihadapi penulis dalam penyusunan tesis ini, namun berkat doa, dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan beasiswa APBN-BPS.
2. Rektor Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dan Dekan Fakultas Fisip Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si., yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA dan Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si sebagai komisi penasehat yang telah memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D, Dr. Buchari Mengge, MA., Dr. Nuvida RAF, S.Sos., MA selaku dosen penguji atas segala koreksi, saran dan masukan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Ibu Maritje Pattiwaellapia SE., M.Si, selaku Kepala BPS Provinsi Maluku yang memberikan kesempatan peneliti dalam melakukan penelitian di BPS Provinsi Maluku.
6. Seluruh dosen pengajar serta staf program studi sosiologi atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa tugas belajar Unhas-BPS “*S3 Wanna Be*” yang memberikan dukungan, masukan, kritik dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Suami tercinta Glen Nikijuluw, anak-anakku Marsha dan Miguel atas dukungan doa, semangat dan kasih sayang kalian selama mami menempuh pendidikan, sampai akhirnya mami kalian dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Orang tua (Bertha, Nelci, dan Minggu) dan keluarga saya, atas dukungan doa dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan di ruangan sosial BPS Provinsi Maluku, atas dukungan dan motivasi yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan
11. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dari mulai perkuliahan, dan dalam proses penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menantikan masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, 24 Januari 2024



JUMERTI DAUD

ABSTRAK

JUMERTI DAUD. *Analisis Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2022* (dibimbing oleh Dwia Aries Tina Pulubuhu dan Hasniati).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) bertujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun dan menyediakan kerangka kebijakan yang peka gender. Persentase kepala rumah tangga perempuan miskin di Maluku tahun 2022 adalah 7,03 persen, meningkat 0.83 poin persentase dari tahun 2021. Untuk mencapai tujuan, peneliti menggunakan metode penelitian campuran, dengan metode analisis data regresi logistik terhadap sampel kepala rumah tangga perempuan sebanyak 882 orang yang bersumber dari Susenas Maret 2022. Untuk memperkuat hasil analisis, dilakukan wawancara mendalam terhadap lima orang informan. Hasil penelitian melalui analisis regresi logistik menunjukkan faktor individu yang tercakup dalam dimensi perangkat kemiskinan Chambers, yaitu dimensi keterasingan/isolasi (tipe daerah tempat tinggal dan tingkat pendidikan), dimensi kerentanan (jumlah anggota rumah tangga), dimensi ketidakberdayaan (akses jaminan perlindungan sosial) berpengaruh secara signifikan terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Maluku tahun 2022. Penelitian ini menyoroti bahwa indikator utama yang harus diperbaiki adalah jumlah anggota rumah tangga karena merupakan determinan utama yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kemiskinan kepala rumah tangga perempuan di Maluku. Kemudian, lebih lanjut ditemukan melalui wawancara mendalam bahwa kepala rumah tangga perempuan mengalami ketidakadilan gender dalam bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda.

Kata kunci: kemiskinan, kepala rumah tangga perempuan, perangkat kemiskinan



ABSTRACT

JUMERTI DAUD. *An Analysis of Poverty of Female-Headed Households in Maluku Province in 2022* (supervised by Dwia Aries Tina Pulubuhu and Hasniati)

The Sustainable Development Goals (SDGs) aim to end poverty in all its forms everywhere and provide a gender-sensitive policy framework. The percentage of poor households headed by women in Maluku in 2022 is 7.03 percent, an increase of 0.83 percentage points from 2021. The researcher used a mixed research method to achieve the objectives, with a logistic regression data analysis method on a sample of 882 female-headed households obtained from the March 2322 Susenas. In-depth interviews were conducted with five informants to strengthen the analysis results. The results with a logistic regression data analysis show that individual factors included in the dimensions of Chambers poverty trap, i.e. the alienation/isolation dimension (type of residence area and level of education), the vulnerability dimension (number of household members), the powerless dimension (access to social protection guarantees) have a significant effect on the poverty status of household heads in Maluku Province in 2022. This research highlights that the primary indicator that must be improved is the number of household members. This is the primary determinant that affects the poverty of female-headed households in Maluku. Beside that the results of in-depth interviews indicate that female-headed households experience gender injustice in surfing and meeting the needs of their families, such as marginalization, subordination, stereotypes, violence, and double burden.

Keywords: poverty, female-headed households, poverty trap



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Ruang Lingkup/Batasan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Teori Perangkat Kemiskinan	16
2.2. Feminisme Kemiskinan dan Gender	19
2.3. Pengertian Kemiskinan	23
2.4. Bentuk-bentuk Kemiskinan	26
2.5. Mengukur Tingkat Kemiskinan	29
2.6. Faktor Penyebab Kemiskinan	30
2.6.1 Dimensi Keterasingan (Isolation) Memengaruhi Kemiskinan	36
2.6.2 Dimensi Kelemahan Jasmani Memengaruhi Kemiskinan	38
2.6.3 Dimensi Kerentanan Memengaruhi Kemiskinan	41
2.6.4 Dimensi Ketidakberdayaan Memengaruhi Kemiskinan	43
2.7 Penelitian Terdahulu	45
2.8 Kerangka Pikir Penelitian	52
2.9 Hipotesis Penelitian	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Rancangan Penelitian	58

3.2 Jenis dan Sumber Data	59
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	60
3.4 Populasi dan Sampel	60
3.5 Unit Analisis Penelitian	61
3.6 Definisi Operasional	62
3.7 Metode Analisis	66
3.7.1. Analisis Deskriptif	66
3.7.2. Analisis Inferensia	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	72
4.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Maluku	72
4.1.2. Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi Provinsi Maluku	73
4.2. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan	76
4.2.1. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Kemiskinan	76
4.2.2. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Keterasingan/Isolasi	79
4.2.3. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Kelemahan Jasmani	83
4.2.4. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Kerentanan	84
4.2.5. Karakteristik Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Ketidakberdayaan	88
4.3 Pengaruh Faktor Individu Terhadap Status Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan	90
4.3.1. Pengujian Signifikansi Model dan Parameter	90
4.3.2. Model Pengaruh Faktor Individu Terhadap Status Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan	94
4.4. Feminisme Kemiskinan dan Ketidakadilan Gender yang dialami Kepala Rumah Tangga Perempuan di Provinsi Maluku	106
BAB V PENUTUP	115
5.1. Kesimpulan	115
5.2. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2022	2
Tabel 2	Persentase Penduduk berumur 5 tahun keatas menurut status pendidikan dan jenis kelami di Provinsi Maluku Tahun 2022	9
Tabel 3	Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2022	12
Tabel 4	Peta Studi Penelitian-Penelitian Sebelumnya	49
Tabel 5	Varibael Dependen dan Variabel Independen	65
Tabel 6	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Tahun 2022	72
Tabel 7	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Tahun 2022	73
Tabel 8	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Tahun 2022	75
Tabel 9	Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan menurut Status Perkawinan dan Status Kemiskinan di Provinsi Maluku, Tahun 2022	78
Tabel 10	Karakteristik Informan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Penyebab menjadi KRT, Pekerjaan dan Pendapatan Bulanan di Provinsi Maluku	79
Tabel 11	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Keterasingan/Isolasi di Provinsi Maluku, Tahun 2022	80
Tabel 12	Karakteristik Informan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Pendidikan di Provinsi Maluku	82
Tabel 13	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Kelemahan Jasmani di Provinsi Maluku, Tahun 2022	83
Tabel 14	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Kerentanan di Provinsi Maluku, Tahun 2022	85
Tabel 15	Karakteristik Informan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga, Aktivitas Makan dan Kepemilikan Tabungan di Provinsi Maluku.....	86

Tabel 16	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Dimensi Ketidakberdayaan di Provinsi Maluku, Tahun 2022	89
Tabel 17	Karakteristik Informan Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Kepemilikan Jaminan Kesehatan dan Kepemilikan Jaminan Perlindungan Sosial di Provinsi Maluku	90
Tabel 18	Hasil uji Hipotesis	90
Tabel 19	Hasil Pengujian Parsial dengan Uji Wald	92
Tabel 20	Nilai Koefisien Regresi dan Odds Ratio menurut Dimensi dan Variabel Perangkat Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan	95
Tabel 21	Nilai Koefisien Regresi dan Odds Ratio menurut Dimensi Keterasingan/Isolasi dan Variabel Perangkat Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan	96
Tabel 22	Nilai Koefisien Regresi dan Odds Ratio menurut Dimensi Kerentanan dan Variabel Perangkat Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan	100
Tabel 23	Nilai Koefisien Regresi dan Odds Ratio menurut Dimensi Ketidakberdayaan dan Variabel Perangkat Kemiskinan Kepala Rumah Tangga Perempuan.....	103
Tabel 24	Matriks Ketidakadilan Gender yang dialami Kepala Rumah Tangga Perempuan di Provinsi Maluku	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2022....	3
Gambar 2.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku, Maret 2018- Maret 2022	6
Gambar 3.	Kerangka Pikir Penelitian	55
Gambar 4.	Tahapan <i>Sequential Explanatory Design</i>	59
Gambar 5.	Alur Pembentukan Unit Analisis	61
Gambar 6.	Proporsi Penduduk Maluku menurut Kategori Penduduk (2020-2035)	74
Gambar 7.	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Berdasarkan Status Kemiskinan Tahun 2022	77
Gambar 8.	Persentase Kepala Rumah Tangga Perempuan Menurut Pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2022	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia dimulai sejak Indonesia merdeka. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kebudayaan yang beraneka ragam, sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan di Indonesia tidaklah mudah. Pada proses pembangunan di suatu negara tidak lepas dari pengaruh sumber daya manusia sebagai pelaku di dalamnya dengan tujuan menyejahterahkan rakyatnya. Permasalahan menyejahterahkan rakyat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi permasalahan untuk semua negara di dunia, setiap negara berusaha mewujudkan tujuan dalam pengentasan kemiskinan menyeluruh, dalam pengertian bahwa tidak ada lagi manusia yang diposisikan di bawah standar hidup layak. Pentingnya aksi ini tertuang dari tujuan nomor satu dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun, yang salah satu targetnya adalah pada tahun 2030, tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh dunia dapat diturunkan.

Berdasarkan laporan Bank Dunia, perlambatan pengentasan kemiskinan secara global terjadi sejak tahun 2015, kemiskinan ekstrem dunia menurun dari 10,1 persen pada tahun 2015 menjadi 9,3 persen pada tahun 2017, namun karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tingkat kemiskinan ekstrem global meningkat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun terakhir, dampak dari pandemi ini adalah penambahan 70 juta orang dalam kemiskinan ekstrem. Hal ini merupakan peningkatan terbesar sejak pemantauan kemiskinan global yang dimulai pada tahun 1990. Akibatnya, sebanyak 719 juta orang diperkirakan hidup dengan pengeluaran kurang dari 2,15 dollar AS per hari. Dan lebih lanjut laporan tersebut memprediksi bahwa sekitar 574 juta orang atau sekitar tujuh persen dari populasi global masih akan hidup dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Kemudian pada tahun 2022 menurut Bank Dunia, Indonesia dan Cina merupakan negara yang menyumbang lebih dari 85 persen penduduk miskin secara regional dimana Indonesia menempati urutan ke-73 negara termiskin di dunia dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 67 juta jiwa.

Pada periode Maret 2022, persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 9,54 persen (lihat Tabel 1), angka ini menurun sebanyak 1,38 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2021 dengan persentase penduduk miskin 10,14 persen, sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal pada periode yang sama disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi, dengan persentase kemiskinan di perkotaan sebesar 7,50 persen sedangkan persentase kemiskinan di perdesaan sebesar 12,29 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar dari penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan tidak hanya berarti masih cukup besarnya kelompok masyarakat yang belum dapat mengenyam hasil pembangunan, tetapi lebih penting lagi adalah besarnya berbagai persoalan yang harus mereka tanggulangi sendiri, keterbatasan dalam tingkat ekonomi, keterbatasan berbagai sarana prasarana transportasi, komunikasi, dan kesehatan telah menjadi penyebab kemiskinan yang bersifat multidimensi (Kutanegara, 1997).

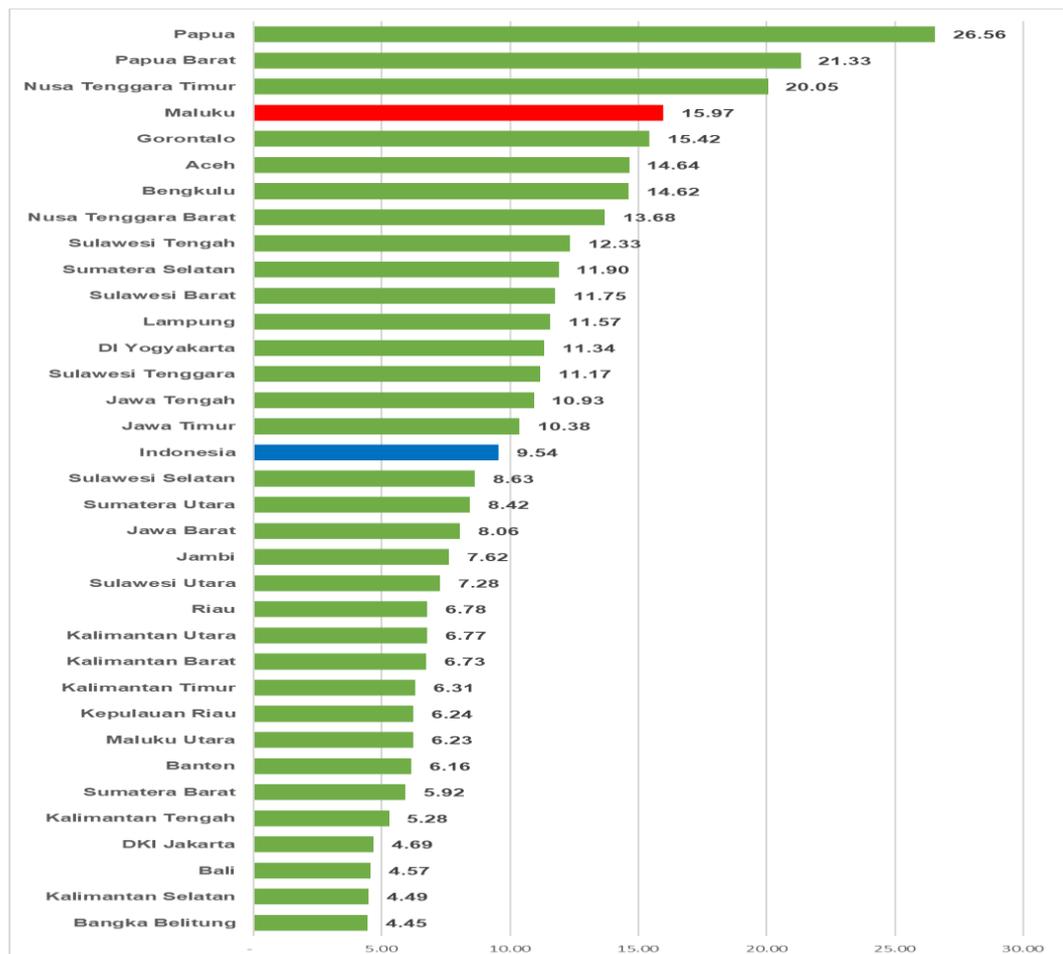
Tabel 1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau, Maret 2022

Pulau	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
1	2	3	4
Sumatera	8,28	10,46	9,49
Jawa	7,63	11,90	9,01
Bali dan Nusa Tenggara	8,77	17,48	13,35
Kalimantan	4,52	7,08	5,82
Sulawesi	5,88	12,93	10,02
Maluku dan Papua	5,60	27,22	19,89
Indonesia	7,50	12,29	9,54

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Tabel 1. juga menunjukkan persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 19,89 persen. Kemudian Berdasarkan Permendagri No.56 Tahun 2015 tentang kodifikasi dan tata wilayah administrasi per provinsi bahwa jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut terbagi menjadi dua kawasan yang kemudian dikenal dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam perjalanannya, ternyata kedua Kawasan tersebut memperlihatkan kecenderungan bahwa provinsi-provinsi yang terletak di Kawasan Barat Indonesia

pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia, misalnya ketersediaan infrastruktur, sarana transportasi, fasilitas Pendidikan dan kesehatan di Kawasan Barat Indonesia (KBI) jauh lebih baik jika dibandingkan dengan daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pembangunan Ekonomi melalui desentralisasi, dimana masing-masing daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengelola daerahnya, tetapi hal ini tidak meluputkan daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia dari masalah kemiskinan dan justru yang terjadi adalah sebagian besar provinsi di wilayah KTI memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi dengan angka kemiskinan di atas angka nasional. Kenyataan ini tergambar dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 bahwa sebagian besar provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas angka nasional Indonesia adalah provinsi yang termasuk dalam Kawasan Indonesia Timur (KTI).



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2022

Sumber: BPS, Maret 2022

Gambar 1, menjelaskan bahwa lima provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu Provinsi Papua sebesar 26,56 persen, kemudian disusul Provinsi Papua Barat sebesar 21,33 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,05 persen, Provinsi Maluku sebesar 15,97 persen, dan Provinsi Gorontalo sebesar 15,42 persen. Tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri kemiskinan, namun komitmen Indonesia dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dalam rangka mengentaskan kemiskinan terlihat dalam Perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia yang tertuang di dalam RPJPN 2005-2025, dijelaskan masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karena kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada atau tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada atau tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga memfokuskan pembangunan saat ini pada pembangunan di pedesaan yaitu menyelesaikan masalah kemiskinan pedesaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini juga tertuang pada poin ketiga dari Nawacita pemerintah yaitu pembangunan perbatasan, untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang satu secara adil dan merata, maka dilakukan membangun Indonesia-sentris yaitu dengan membangun dari pinggiran, dari desa, dari pulau terdepan hingga perbatasan. Membangun dari pinggiran bukan saja terkait kewilayahan atau geografis daerah yang berdekatan dengan perbatasan negara tetangga, tetapi juga soal manusia yang terpinggirkan dan kurang mampu secara ekonomi.

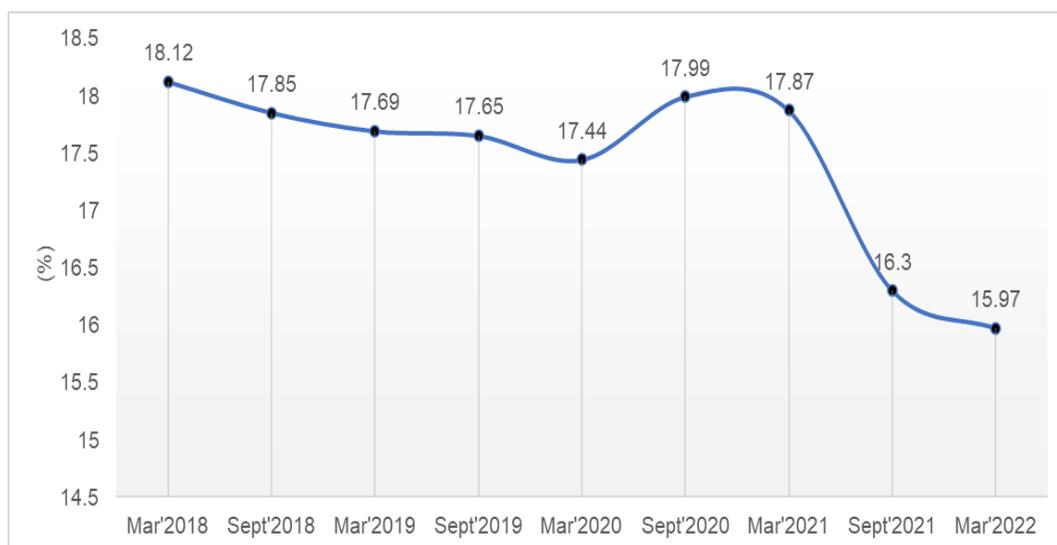
Berdasarkan hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan

dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, anggaran terkait kemiskinan di tahun anggaran 2021 mencapai Rp.526 triliun (tnp2k.2021). Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Pada tahun 2021 upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 mensasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Langkah upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim kemudian tercermin pada Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan target nol persen pada tahun 2024. Inpres tersebut telah mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementrian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang perlu diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (TNP2K dan Kemenko Perekonomian, 2021).

Maluku merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia dan menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021. Pada Maret 2022 persentase penduduk miskin di Maluku mencapai 15,97 persen dengan persentase penduduk kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 sebesar 3,62 persen. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. Namun jumlah penduduk miskin Indonesia dan terkhususnya di provinsi Maluku tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata, malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya dan persentase penduduk miskin yang masih tinggi pada lima tahun terakhir menempatkan Maluku pada urutan ke-empat termiskin di Indonesia (BPS, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa secara umum lima tahun terakhir pada periode Maret 2018 hingga Maret 2022, persentase penduduk miskin di Maluku mengalami penurunan, perkecualian pada September 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 (BPS,2022). Walaupun persentase kemiskinan di provinsi Maluku mengalami penurunan pada periode Maret 2022, hal ini tidak sejalan untuk persentase rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan yang sebesar 7,03 persen, meningkat 0,83 poin dibandingkan pada tahun 2021 (BPS Maluku, 2023)



Gambar 2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku, Maret 2018 - Maret 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Upaya pengentasan kemiskinan dan keberhasilan pembangunan di suatu negara seringkali dikaitkan dengan perempuan. Pembangunan suatu daerah dapat dikatakan berhasil sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan. Alasan dari keseimbangan ini mempertimbangkan bahwa hampir setengah populasi di dunia adalah perempuan, sehingga diperlukan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta orang dan berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki, yaitu 136,66 juta laki-laki dan 133,54 juta perempuan (BPS, 2020). Dalam perspektif internasional, kesetaraan gender merupakan komitmen yang tertuang pada tujuan kelima dari Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yaitu “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan”. Kesetaraan gender merupakan jalan untuk mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Perempuan merupakan korban pertama kemiskinan, meski demikian berbagai penelitian menunjukkan peran perempuan yang lebih besar dibanding laki-laki dalam mengurangi kemiskinan. Berbagai kajian di negara maju menyatakan bahwa yang membuat suatu negara menjadi maju adalah tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan di negara tersebut. Hal ini juga sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi dan pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk mendukung tujuan pembangunan, dengan meningkatkan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Yildiz, 2016). Kemudian menurut McKinsey & Company (2018), usaha untuk memberdayakan perempuan di negara-negara Asia Pasifik dapat memberikan tambahan USD 4,5 triliun pada PDB di tahun 2025 atau setara dengan peningkatan 12 persen dari baseline. Sementara menurut World Bank (2020), dengan mengurangi ketimpangan gender dalam angkatan kerja Indonesia akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 9 persen pada tahun 2025.

Pengarusutamaan gender merupakan bagian integral dalam agenda pembangunan di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dituangkan kedalam RPJPN dan RPJMN. Dalam RPJMN 2020-2024 kesetaraan gender menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah, dengan penerapan strategi PUG dalam pembangunan. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kesetaraan gender, dengan masih terdapatnya kesenjangan gender dalam berbagai aspek pembangunan, antara lain pendidikan, kesehatan serta kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan (Siscawati et al., 2020).

Peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan perempuan dalam tenaga kerja dan aktivitas ekonomi akan membantu peningkatan pendapatan negara yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan negara. Selain memiliki manfaat ekonomi, peningkatan kesetaraan gender juga bermanfaat bagi diri

perempuan itu sendiri, anak, keluarga dan masyarakat. Dengan kesetaraan gender akan menghasilkan perempuan yang lebih sehat, berpendidikan, produktif secara ekonomi, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, kemudian manfaat untuk anak yaitu anak bertumbuh dan berkembang lebih maksimal karena mendapatkan pendidikan dan pengasuhan seimbang dari kedua orang tua (ada pembagian peran domestik yang seimbang).

Pada tahun 2022, selain masalah peningkatan persentase kemiskinan perempuan, Maluku juga menghadapi tantangan dan permasalahan dalam mencapai kesetaraan gender yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dimana IPM perempuan dengan nilai 68,65 masih tertinggal dibandingkan IPM laki-laki yang sudah mencapai nilai 73,66 dengan status tinggi, kemudian untuk Indeks Pemberdayaan Gender mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 75,54 menjadi 74,99 pada tahun 2022 (BPS, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan yang dikenal sebagai feminisasi kemiskinan (Pearce, 1978; Peterson, 1987; Chan, 2006; Bradshaw et al., 2007; Singh, 2023). Berbagai penelitian terkait kemiskinan yang dialami perempuan menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan keterbatasan perempuan dalam akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam aspek ekonomi memengaruhi kualitas hidup perempuan sehingga pada akhirnya membuat perempuan lebih rentan menjadi miskin dibandingkan laki-laki (Todaro dan Smith, 2011; Hastuti, 2014; Bradshaw et al., 2017; Nisak dan Sugiharti, 2020).

Meskipun kesetaraan gender di bidang pendidikan telah membaik di tingkat nasional dalam satu dekade terakhir, namun permasalahan kesetaraan gender di bidang pendidikan masih dihadapi oleh Provinsi Maluku, yang ditunjukkan oleh capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan status pendidikan antara perempuan dan laki-laki, dimana capaian RLS perempuan hanya mencapai 9,95 tahun atau hanya sampai kelas IX SMP/ sederajat, lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang sudah mencapai 10,11 tahun atau sampai kelas X SMA/ sederajat (BPS Maluku, 2021). Kemudian jika dilihat dari status pendidikan pada tahun 2022 di Provinsi Maluku (Tabel 2) bahwa persentase penduduk perempuan dengan usia 5 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 3,36 persen dibandingkan 3,05 persen, sedangkan untuk status pendidikan masih sekolah terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang

masih sekolah untuk setiap jenjang pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki (BPS Maluku, 2022).

Tabel 2. Persentase Penduduk berumur 5 tahun keatas menurut status pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2022

Status Pendidikan	Persentase Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
Tidak/Belum pernah sekolah	3,05	3,36	3,20
Masih Sekolah	31,43	30,40	30,92
SD/MI/Paket A/SDLB	14,15	13,27	13,71
SMP/MTs/Paket B/SMPLB	6,00	5,55	5,78
SMA/SMK/MA/Paket C/SMLB	6,47	6,03	6,25
Diploma s.d Universitas	4,80	5,56	5,17
Tidak bersekolah lagi	65,52	66,24	65,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2022

Gambaran di atas memperlihatkan terjadinya kesenjangan gender pada aspek pendidikan yang terjadi di Provinsi Maluku yang merupakan salah satu indikator penyumbang dampak kemiskinan pada perempuan, karena dengan pendidikan yang baik akan meningkatkan modal sosial perempuan dalam upaya mencapai taraf hidup yang sejahterah. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Dwiyantri bahwa kaum perempuan di negara berkembang pada umumnya terlalu banyak menanggung beban kemiskinan, keterbatasan taraf pendidikan, kelangkaan lapangan pekerjaan yang memadai, serta mobilitas sosial yang minim (Dwiyantri, 2015). Lebih lanjut berdasarkan penelitian Hastuti tahun 2014 ditemukan bahwa kemiskinan banyak dialami perempuan, meskipun kondisi tersebut tidak serta merta mendorong perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk melepaskan lilitan kemiskinan yang dialami namun rendahnya tingkat pendidikan dan semakin sempitnya penguasaan lahan mendominasi karakteristik perempuan di rumah tangga miskin. Selain itu, pendidikan juga menentukan pola pikir dalam mengambil keputusan dalam memilih pekerjaan atau menentukan keputusan terhadap pendidikan anak yang merupakan generasi penerus yang dapat memutus mata rantai kemiskinan karena semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga, maka mereka akan semakin memahami urgensi pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan (Fadila dan Utomo, 2020; W. Wei et al., 2021).

Menurut Chambers (1983) rumah tangga miskin dan lingkungannya terjebak dalam satu mata rantai. Mata rantai ini kadang-kadang disebut lingkaran setan, sindrom kemiskinan atau perangkap kemiskinan. Chambers menyatakan bahwa ada hubungan antar unsur-unsur dalam ketidakberdayaan, kerentanan, kelemahan fisik, kemiskinan dan isolasi sehingga membentuk sebuah mata rantai yang disebut sebagai “perangkap kemiskinan (*poverty trap*)”. Sejalan dengan pemikiran dari Chamber, permasalahan kemiskinan yang dialami oleh keluarga miskin tidak hanya didominasi oleh unsur kekurangan materi semata melainkan juga terdapat unsur-unsur lain dalam kemiskinan mereka yaitu unsur kelemahan jasmani, keadaan terasing (isolasi), rentan dan ketidakberdayaan yang tentu saja keadaan tersebut menimpa keluarga miskin dengan kadar penderitaan yang berbeda satu dengan yang lainnya (Arifiyanto, 2002). Dikalangan orang miskin, perempuan adalah kelompok termiskin dan mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang memomorduakan perempuan dan ketimpangan gender memperparah kemiskinan perempuan dan sebaliknya, bahwa kemiskinan berkontribusi terhadap semakin tajamnya ketimpangan gender (Indraswari,2009).

Menurut AVS Hubeis dan Mulyandari (2010), inklusif gender dan kemiskinan, merupakan nilai yang diperjuangkan oleh berbagai lembaga yang memberi perhatian khusus pada isu gender, di antaranya adalah *Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme* (ACCESS) dan menjadi pegangan di dalam melaksanakan program. Untuk itu ACCESS mencoba mengembangkan kebijakan, strategi dan teknik-teknik yang bisa digunakan untuk mendorong agar nilai Gender and Poverty Inclusive (GPI) bisa diterapkan dan mewarnai semua aktivitas, dengan menggunakan proses-proses yang partisipatif. Dalam kajiannya yang berjudul Analisis Teori Performance dan Positioning dalam Komunikasi Pembangunan Berwawasan Gender, AVS Hubeis dan Mulyandari menyatakan bahwa perempuan miskin lebih menderita daripada laki-laki miskin dan lebih menderita daripada sesama perempuan yang berasal dari kelas ekonomi yang lebih baik. Beberapa kondisi umum yang harus dihadapi orang miskin yaitu kekurangan pangan, penghasilan yang minim, penyakit yang tidak diobati karena masalah biaya dan akses ke fasilitas kesehatan, gizi buruk, rumah yang tidak sehat, lingkungan yang buruk dan sulitnya persediaan air bersih. Kondisi ini memaksa orang miskin untuk menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya bisa bertahan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan kesetaraan gender pada aspek kesehatan dan aspek ketenagakerjaan masih dirasakan oleh Provinsi Maluku. Dalam beberapa penelitian, data keluhan kesehatan digunakan sebagai indikator untuk melihat isu kesetaraan gender di bidang kesehatan (Fajriyah dan Budiantara, 2015; Lukiswati et al., 2020; KemenPPA, 2020; W Wei et al, 2021). Pada tahun 2022, persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan di Provinsi Maluku menunjukkan bahwa persentase perempuan yang memiliki keluhan kesehatan sebesar 17,08 persen lebih tinggi dibandingkan dengan angka keluhan kesehatan laki-laki sebesar 14,15 persen, dan lebih jauh lagi angka kesakitan penduduk perempuan lebih tinggi yaitu 8,18 persen dibandingkan dengan laki-laki yaitu 6,88 persen (BPS Maluku, 2022).

Selain angka keluhan kesehatan yang menggambarkan kesehatan masyarakat, angka kematian ibu dan stunting juga menjadi indikator isu kesetaraan gender yang berkaitan dengan kemiskinan. Tingginya angka kematian ibu dan angka stunting menggambarkan bahwa masalah ini harus menjadi perhatian karena tingginya angka kematian ibu dan stunting merupakan masalah yang akan ditanggung sepanjang hidup anak dan secara makro berpotensi memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berdasarkan laporan BPS Provinsi Maluku, angka kematian ibu sebesar 261 kematian per 100.000 kelahiran hidup, yang masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 sebesar 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup (BPS Maluku, 2023). Menurut penelitian Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) pada tahun 2022, prevalensi stunting di provinsi Maluku masih relatif tinggi yaitu 26,1 persen, yang melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO yaitu 20 persen (Kemenkes, 2022).

Lebih lanjut bahwa kesenjangan akses ketenagakerjaan juga terlihat pada indikator akses terhadap pasar tenaga kerja merefleksikan sejauh mana sebuah negara memberikan peluang pekerjaan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Indikator akses terhadap pasar tenaga kerja, antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja mengukur peluang penduduk untuk mengakses pasar tenaga kerja yang ada, Indikator lain adalah persentase penduduk yang bekerja dan rasio penduduk bekerja terhadap total penduduk. Menurut BPS (2022), di Provinsi Maluku terjadi kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan, TPAK laki-laki yaitu sebesar 78,33 persen lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan yaitu sebesar 52,47 persen.

Berdasarkan status pekerjaan utama (Tabel 3), penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan kegiatan informal. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, maka penduduk laki-laki lebih banyak bekerja pada kegiatan formal sebesar 37,78 persen, sedangkan penduduk perempuan lebih banyak bekerja pada kegiatan informal yaitu sebanyak 203.472 orang (65,01%) dengan status pekerjaan utama sebagai pekerja keluarga/tak dibayar) sebesar 25,58 persen (BPS Maluku, 2023).

Tabel 3. Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2022

Indikator	Penduduk 15 keatas yang Bekerja			
	Laki-Laki		Perempuan	
	(orang)	(%)	(orang)	(%)
Status Pekerjaan Utama				
Berusaha sendiri	178.622	36,02	85.860	27,43
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	72.325	14,59	34.204	10,93
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13.829	2,79	2.665	0,85
Buruh/Karyawan/Pegawai	173.481	34,99	106.859	34,14
Pekerja Bebas di Pertanian	4.279	0,86	658	0,21
Pekerja Bebas di Non Pertanian	16.775	3,38	2.673	0,85
Pekerja tak dibayar	36.537	7,37	80.077	25,58
Total	495.848	100,00	312.996	100,00
Kegiatan Formal/Informal				
Formal	187.310	37,78	109.524	34,99
Informal	308.538	62,22	203.472	65,01
Total	495.848	100,00	312.996	100,00

Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2022

Kesenjangan yang terjadi pada akses kesehatan dan ketenagakerjaan ini mengindikasikan bahwa dengan kondisi ekonomi yang terpuruk akan dapat menyebabkan perempuan miskin (Todaro, 2011), kemudian menurut Birdshal dan McGreevey (1983) menyatakan fakta bahwa beban perempuan miskin lebih besar karena peran ganda yaitu sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah untuk keluarga (Hubeis, 2010). Perempuan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak, menyiapkan makanan, mengambil air dan kayu bakar, mencuci baju, membersihkan rumah, mengatur keuangan rumah tangga, yang

menyerap sebagian besar waktu mereka. Namun, pekerjaan ini sering tidak dianggap sebagai sebuah “pekerjaan”, sehingga juga tidak diperhitungkan dalam “produksi” sebuah rumah tangga. Hal ini diperburuk lagi dengan adanya anggapan bahwa penghasilan perempuan hanya sebagai “tambahan” penghasilan suami. Terdapat keterkaitan antara perempuan dengan kondisi kemiskinan, dimana budaya patriarki secara tidak langsung telah memberikan batasan-batasan bagi perempuan dan ketidakadilan serta ketidaksetaraan turut melahirkan kedekatan identitas perempuan dengan kemiskinan.

Pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan, dan perempuan dibandingkan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumberdaya ekonomi sebagai pintu dalam penghapusan berbagai ketidakadilan dalam masyarakat. Dan penelitian Bradshaw et.al (2018) memperkuat hal ini bahwa meskipun semakin banyak perempuan yang terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau kegiatan produktif, yang berpotensi mengurangi kemiskinan, fakta bahwa mereka umumnya harus menggabungkan kegiatan produktif dengan pekerjaan reproduktif membuat mereka semakin miskin. beban kerja yang berat dan ketidakmampuan untuk beristirahat dan memulihkan diri secara memadai dapat berimplikasi negatif pada kesehatan dan pada gilirannya berdampak pada kemiskinan moneter. Sehingga rumah tangga yang dikepalai perempuan lebih miskin daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki (Bradshaw et al., 2018; Noh Kim, 2015; Chant, 2007).

Permasalahan dan gambaran kesenjangan gender yang terjadi mengisyaratkan bahwa penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Kesejahteraan perempuan merupakan suatu masalah yang masih dihadapi di Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Berbagai penelitian terkait kemiskinan yang dialami perempuan menunjukkan bahwa kesetaraan gender dan keterbatasan perempuan dalam akses ruang publik dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi, seperti faktor ekonomi, sosiokultural, struktural, sumber daya alam dan modal sosial serta faktor-faktor sosial demografi perempuan itu sendiri, sehingga dirasa perlu untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemiskinan perempuan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan terkait program pengentasan kemiskinan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta dapat meningkatkan peran dan pemberdayaan

perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan suatu daerah dan juga meningkatkan modal sosial perempuan itu sendiri dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran umum karakteristik kepala rumah tangga perempuan miskin di Provinsi Maluku tahun 2022?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemiskinan kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Maluku tahun 2022?
3. Bagaimana ketidakadilan gender yang dialami kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Maluku tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran umum karakteristik kepala rumah tangga perempuan miskin di Provinsi Maluku tahun 2022
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemiskinan kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Maluku tahun 2022.
3. Mendeskripsikan ketidakadilan gender yang dialami kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Maluku tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yakni ilmu sosiologi khususnya terkait permasalahan kemiskinan perempuan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah Provinsi Maluku dalam membuat kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan perempuan serta pemberdayaan perempuan.
3. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan perempuan di Provinsi Maluku.
4. Hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan perempuan di Provinsi Maluku Tahun 2022.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian/Batasan Penelitian

Lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan di Provinsi Maluku tahun 2022 yang diukur melalui analisis deskriptif dan analisis inferensia menggunakan analisis regresi logistik biner. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan perempuan mencakup faktor individu berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi dan demografi perempuan miskin yaitu tipe daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan, umur, keluhan kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan, kepemilikan tabungan, kepemilikan jaminan kesehatan dan akses jaminan perlindungan sosial. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2022 di Provinsi Maluku yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku untuk menganalisis faktor individu, serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam atau *indepth interview* untuk mengkaji perangkap kemiskinan yang memengaruhi status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan, serta bagaimana ketidakadilan gender yang dialami kepala rumah tangga perempuan.

Untuk memfokuskan penelitian agar tujuan penelitian dapat tercapai dan memudahkan pembahasan, dalam penelitian ini terdapat keterbatasan masalah yang disajikan dimana penelitian ini hanya akan berfokus pada kepala rumah tangga perempuan pada periode Maret 2022, dengan penentuan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perangkap Kemiskinan

Perangkap kemiskinan merupakan konsep yang sangat kompleks jika dibandingkan dengan kemiskinan. Kemiskinan adalah satu dimensi dari perangkap kemiskinan. Definisi kemiskinan dari Chambers (1983) menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

- (1) Kemiskinan (*Poverty*), permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan;
- (2) Keterasingan (*Isolation*), Dimensi keterasingan yang dimaksud adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan;
- (3) Kelemahan Jasmani (*Physical weakness*), mendorong orang ke arah kemiskinan melalui beberapa cara yaitu: tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, tidak mampu menggarap tanah yang luas, bekerja terlalu lama, upah yang rendah bagi kaum wanita atau orang yang lemah dan pengurangan atau kelemahan karyawan karena sakit. Tubuh yang lemah sering membuat seseorang tidak mampu atau tersisih dalam mengikuti pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat. Tubuh yang lemah mengakibatkan orang tidak berdaya, karena kekurangan tenaga dan waktu, untuk melakukan unjuk

rasa, berorganisasi dan politik, orang kelaparan dan sakit-sakitan tidak akan berani berbuat macam-macam.

- (4) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*vulnerability*) seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini;
- (5) Ketidakberdayaan (*Powerless*), orang yang tidak berdaya seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, dapat juga terhalang dalam memperoleh bantuan hukum dan memiliki keterbatasan untuk menuntut upah yang layak, dan pada umumnya rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Keterkaitan antar dimensi perangkap kemiskinan, lebih lanjut dijelaskan oleh Suyanto (1995) yaitu sebagai berikut:

- a. Kemiskinan merupakan unsur pertama yang membuat orang miskin. Kemiskinan menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor yang lainnya. Dikarenakan kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang lemah jasmani akibat kurang makan, kekurangan gizi, rentan pada serangan penyakit, rentan terhadap keadaan darurat atau keadaan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan, dan seseorang menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang rendah.
- b. Unsur kedua adalah isolasi atau keterasingan diakibatkan oleh dua faktor, yaitu lingkungan dan pendidikan. Keterasingan yang disebabkan oleh faktor lingkungan disebut juga sebagai kemiskinan natural, dimana masyarakat menjadi terasing karena tempat tinggal mereka yang jauh dari jangkauan pemerintah, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi atau bantuan. Sedangkan dari faktor pendidikan,

keterasingan yang dialami masyarakat miskin karena mereka umumnya berpendidikan rendah, sehingga sering dikucilkan dan tidak di hargai keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya.

- c. Unsur ketiga adalah kelemahan Jasmani, Kelemahan jasmani yang dialami seseorang mendorongnya ke arah kemiskinan melalui berbagai cara: produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah, tidak mampu bekerja lebih lama. Tubuh yang lemah, membuat seseorang tersisih karena tidak ada waktu atau tidak kuat menghadiri pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan informasi baru. Jasmani yang lemah juga memperpanjang kerentanan seseorang karena terbatasnya kemampuan untuk mengatasi krisis atau keadaan darurat
- d. Unsur keempat adalah kerentanan. Kerentanan masyarakat miskin disebabkan karena mereka tidak memiliki cadangan uang atau makanan untuk keadaan darurat. Jadi apabila mereka mengalami masa darurat, seperti tiba-tiba sakit atau mendapat musibah lainnya, mereka terpaksa menjual barang-barang mereka atau bahkan berhutang. Kerentanan merupakan unsur yang sangat membahayakan, karena dapat membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin, kaitannya dengan keterpencilan (isolasi) khususnya secara sosial (menjauhi pergaulan) akibat guncangan atau kejadian mendadak, serta kaitannya dengan ketidakberdayaan dicerminkan dengan ketergantungan terhadap majikan atau orang yang dijadikan gantungan hidupnya.
- e. Unsur kelima yaitu ketidakberdayaan, mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, antara lain yang terpenting adalah pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya, seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, setidaknya terhalang atau terhambat memperoleh bantuan hukum, serta membatasi kemampuannya untuk menuntut upah yang layak atau menolak suku bunga, menempatkan dirinya pada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi jual beli, mereka tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap pemerintah dalam mengambil keputusan. Faktor ini mendorong kelemahan jasmani, karena waktu dan tenaga dicurahkan untuk memperoleh akses, karena tenaga dicurahkan untuk memenuhi kewajiban terhadap majikan, sehingga mengurangi waktu dan tenaga untuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya. Isolasi juga berkaitan dengan ketidakberdayaan

melalui ketidakmampuan mereka menarik bantuan pemerintah, sekolah atau petugas lapangan dan sumber lainnya. Orang tidak berdaya juga membuat orang miskin lebih rentan terhadap tuntutan untuk membayar utang, terhadap ancaman hukum atau denda atau terhadap penyalahgunaan wewenang yang merugikan.

2.2. Feminisme Kemiskinan dan Gender

2.2.1. Feminisme Kemiskinan

Istilah feminisme ditinjau secara etimologis berasal dari bahasa latin *femmina* yang berarti perempuan. Kata tersebut diadopsi dan digunakan oleh berbagai Bahasa di dunia. Dalam Bahasa Perancis yang digunakan kata *femme* untuk menyebut perempuan. Feminitas dan maskulinitas dalam arti sosial (gender) dan psikologis harus dibedakan dengan istilah *male* (laki-laki) dan *female* (perempuan) dalam arti biologis (*sex*/jenis kelamin). Dalam hal ini, istilah feminisme terasa lebih dekat dengan feminis, sehingga tidak jarang feminisme seringkali diartikan sebagai sebuah gerakan sosial bagi kaum feminis (Nugroho, 2004).

Menurut Fakhri (2013) pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya, institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat. Karena kesalahpahaman itu, feminisme tidak saja kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan, tetapi juga secara umum ditolak oleh masyarakat. Secara konseptual, feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas, dieksploitasi sehingga harus ada upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun ada beberapa aliran feminisme, pada hakikatnya mereka sepaham bahwa perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat, dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Pada tahun 70an, konsep feminisasi kemiskinan (*feminization of poverty*) muncul. Diana Pearce mengangkat konsep ini setelah kajiannya di Amerika

Serikat mendapati bahwa kaum perempuan dan rumah tangga yang dikepalai perempuanlah yang lebih banyak dan lebih parah dalam mengalami kemiskinan.

Chen et al (2005) menggambarkan feminisme kemiskinan sebagai “beban kemiskinan yang ditanggung oleh perempuan khususnya di negara-negara berkembang, kemudian Chant (2006) menambahkan bahwa feminisme kemiskinan tidak hanya konsekuensi dari kurangnya pendapatan, tetapi juga hasil dari perampasan kemampuan dan bias gender yang hadir dalam masyarakat dan pemerintah dan juga berhubungan dengan meningkatnya insiden ibu sebagai kepala rumah tangga tunggal. Sedangkan menurut Henslin (2006) feminisasi kemiskinan merupakan hilangnya peluang-peluang dan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan hidup, sehingga menjadikan mereka tidak memperoleh fasilitas-fasilitas pendidikan, ekonomi dasar, pekerjaan, perlindungan keamanan, keterlibatan politik, dan sebagainya.

Kemudian lebih lanjut bahwa Chant (2007) mengemukakan karakteristik umum dari feminisasi kemiskinan yaitu (1) perempuan relatif mengalami kemiskinan lebih tinggi daripada laki-laki; (2) perempuan relatif mengalami kemiskinan yang lebih dalam/buruk daripada laki-laki; (3) perempuan lebih rentan mengalami kemiskinan yang lebih panjang; (4) perempuan relatif menanggung beban yang lebih berat dalam mengalami kemiskinan daripada laki-laki; (5) perempuan relative menghadapi tantangan yang lebih banyak untuk keluar dari kemiskinan daripada laki-laki; (6) perempuan lebih rentan jatuh miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga; (7) perempuan merupakan kelompok yang paling miskin ketika berperan sebagai kepala keluarga; dan (8) perempuan cenderung mewariskan kemiskinan ke anak-anak mereka ketika mereka sebagai kepala rumah tangga (kemiskinan lintas generasi).

2.2.2. Gender

Pada awalnya, menurut Echos (2003) term gender diartikan dengan jelas sebagai ‘jenis kelamin’ (Chotban S dan Kasim Azis, 2020). Dalam perkembangannya, keduanya mulai dibedakan makna dan penggunaannya. Adalah Robert Stoller orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ‘gender’ untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang bersifat biologi. Termasuk orang yang berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender dalam ilmu

sosial adalah Ann Oakley. Sebagaimana halnya Stoller, Oakley menjadikan gender sebagai istilah untuk mengidentifikasi perbedaan yang bersifat sosial budaya (Nugroho, 2011).

Sehingga gender tidak lagi diartikan sebagai seks: tidak digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan yang bersifat biologis antara laki-laki dan perempuan. Ia digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan yang bersifat "sosial budaya" antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2013), kemudian senada dengan itu, H.T. Wilson (1989) dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan kontribusi antara laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Begitu pula Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex and Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Nugroho, 2011).

Dengan demikian, gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang konstruksi sosial budaya. Hal ini berbeda dengan seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek anatomi biologi.

Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender (*gender differences*). Karenanya, ketidakadilan gender lebih merupakan ideologi, sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut (Chotbah & Kasim, 2020). Dan menurut Mansour Fakih (2013) bahwa perbedaan gender menimbulkan justifikasi fungsi dan peran yang mengandung ketidakadilan dalam gender tersebut. Manifestasi tersebut meliputi:

- (1) Marginalisasi (Pemiskinan Ekonomi) terhadap perempuan. Perempuan selalu diberi pengklasifikasian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dianggap pantas secara sosial. Sedangkan, seringkali pekerjaan-pekerjaan yang dianggap pantas untuk perempuan adalah tetap di bawah posisi pekerjaan laki-laki. Menempatkan perempuan pada konteks pekerjaan yang dikatakan kurang sesuai untuk perempuan, yang biasanya hanya mampu dikerjakan oleh laki-laki dan membutuhkan tenaga yang

kuat, pengambilan keputusan yang tegas, dan sikap maskulin lainnya, merupakan salah satu bentuk marginalisasi dan ketidakadilan gender pada perempuan. Marginalisasi adalah bentuk kemiskinan perempuan terutama di lapisan masyarakat yang kesejahteraannya minim.

- (2) Posisi perempuan selalu diletakkan di bawah kepentingan laki-laki menjadikan unsur ketidakadilan terhadap perempuan. Dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan, laki-laki yang diutamakan dan perempuan hanya pengikut yang tunduk terhadap keputusan tersebut. tafsir agama yang seolah mendukung adanya posisi subordinat tersebut dicoba untuk dipertanyakan kembali mengenai penafsirannya.
- (3) Pelabelan negatif (stereotip) terhadap perempuan. Semua bentuk ketidakadilan gender sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan perempuan. Berbagai macam stereotip telah banyak dilekatkan ke dalam diri perempuan, yang secara tidak langsung menyulitkan, membatasi dan mendiskriminasi aktivitas perempuan. Anggapan bahwa pekerjaan laki-laki adalah mencari nafkah, sedangkan perempuan tidak, menyebabkan rendahnya upah perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki.
- (4) Kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki maskulin. Asumsi tersebut menganggap bahwa perempuan lemah sedangkan laki-laki kuat. Perbedaan tersebut menjadikan banyak potensi terhadap adanya kekerasan baik secara fisik maupun secara mental dan simbolik terhadap perempuan, karena adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, sehingga dijadikan sebagai alasan untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena, berupa tindakan kekerasan. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memposisikan perempuan sebagai korban. Perempuan merupakan makhluk lemah yang layak untuk mendapat tindakan kekerasan, apalagi jika diatasnamakan mematuhi istri kepada suami.
- (5) Beban ganda (*double burden*) terhadap perempuan. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Perempuan tidak bisa memungkiri bahwa mereka tidak mampu meninggalkan ranah domestik secara penuh. Tuntutan tanggung jawab perempuan atas ranah domestik tersebut muncul meskipun perempuan

tersebut telah melakukan peran penuh di ranah publik. Hal tersebut sangat sulit dihilangkan hingga saat ini, sehingga beban gandalah yang akan muncul terhadap kaum perempuan.

2.3. Pengertian Kemiskinan

Kuncoro (1997) menyatakan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum, seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Rumusan kemiskinan menurut Friedman (1992) sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut: (1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan, dan sebagainya); (2) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum dan fasilitas kesehatan dan pendidikan); (3) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka; (4) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia; (5) Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Di sisi lain menurut Amartya sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk. Sehingga kemiskinan dianggap sebagai fenomena multidimensional.

Kemudian Kartasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Lebih lanjut Kartasmita mengemukakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Friedman (1992) yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis

kekuatan sosial. Gambaran kemiskinan dapat dilihat sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berteduh, ketidakmampuan mendapatkan pengobatan secara medis, ketiadaan akses untuk bersekolah dan buta huruf, pengangguran, kekhawatiran tentang masa depan bahkan kehidupan pada suatu hari berikutnya. Potret kemiskinan lainnya adalah kehidupan tidak sehat yang disebabkan oleh air kotor, ketidakberdayaan, kehilangan aspirasi dan kebebasan. Kemiskinan yang dipahami memiliki konsep multidimensional mencakup seluruh indikator kesejahteraan, mempunyai banyak wajah, yang berubah dari waktu ke waktu dari satu tempat ke tempat yang lainnya (Tara Bedi, et.al, 2006).

Menurut Gillin dan Gillin dalam Senewe (2021), Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana.

Terkait masalah kemiskinan, maka John Maynard Keynes (1936) dalam Safitri (2022) menjelaskan bahwa masalah kemiskinan muncul karena adanya paradoks masalah ekonomi bernama "*poverty in the midst of plenty*" yang artinya kemiskinan di tengah kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuat kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakmampuan dari sistem untuk membuat penyesuaian otomatis menjadi penyebab ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan. Kemudian lebih lanjut bahwa menurut Yacoub (2010) bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global.

Hal terkait kemiskinan juga disampaikan oleh Lembaga Penelitian SMERU (2001) yang menyatakan pengertian lain kemiskinan yakni sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam kepemilikan alat produksi, kemiskinan terkait pula dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat.

Sementara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memandang bahwa kemiskinan memiliki manifestasi yang bervariasi, termasuk keterbatasan pendapatan dan kecukupan sumber daya produksi untuk menjamin mata pencaharian secara terus-menerus, kelaparan dan kurang gizi, kesehatan yang rendah, keterbatasan akses pada pendidikan dan pelayanan dasar, peningkatan jumlah penderita penyakit dan kematian karena penyakit, gelandangan dan rumah kumuh, lingkungan yang tidak sehat, serta diskriminasi sosial dan keterasingan. Kemiskinan juga ditandai dengan keterbatasan pada partisipasi pengambilan keputusan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat (United Nations,2006).

Menurut Bradshaw (2005) kemiskinan merupakan situasi yang serba kekurangan makanan pokok, tempat perlindungan, sarana kesehatan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang bermartabat. Sedangkan menurut Cahyat (2007), kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan. Kemudian menurut Mencher (Siagian, 2012) kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga memengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak.

Menurut *World Bank* (Bappenas,2018), dalam definisi kemiskinan adalah:

“Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having a job, it is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom”.

Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan tempat tinggal, rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan berkaitan dengan ketiadaan lapangan pekerjaan. Kemiskinan berkaitan dengan kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh ketiadaan akses terhadap air bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan dan kurangnya keterwakilan atau representasi dan kebebasan.

Berdasarkan definisi dari Bappenas (2018) kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti

makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, kemiskinan kemudian tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan lain seperti bersosialisasi dan berpolitik.

Badan Pusat Statistik (BPS,2022) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran perkapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran perkapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makan.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yang disebabkan oleh akibat lingkungan ataupun suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari dan merupakan akar kemiskinan yang akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya dan politik).

2.4. Bentuk-bentuk Kemiskinan

Menurut Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (2) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan; (4) *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan atau masyarakat.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kartasasmita dan Baswir (1997) dalam Kartika (2013) menyebutkan tiga bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan, yakni:

- a. Kemiskinan natural didefinisikan sebagai kondisi kemiskinan yang merupakan, kelompok masyarakat tersebut tidak memiliki sumber daya

yang cukup seperti sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya memperoleh penghasilan yang rendah. Sementara menurut Baswir (1997), kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam. Menurut Kartasasmita (1997), kemiskinan seperti itu disebut sebagai "*persisten poverty*", yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun.

- b. Kemiskinan Kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kemalasan, tidak disiplin, boros, apatis, nrimo, dan sebagainya.
- c. Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakannya berbagai macam program dan kebijakan. Namun, terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya sehingga kesempatan untuk mengakses program tersebut menjadi tidak merata dan pada akhirnya menyebabkan ketimpangan. Selanjutnya menurut Kartasasmita (1997) menyebut hal tersebut sebagai "accident poverty", yakni kemiskinan yang muncul sebagai akibat dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu (1) kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan. (2) kemiskinan relatif, adalah sekelompok orang dalam masyarakat apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak; (3) kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya; (4) kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup

masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil), rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat dalam mengikuti ekonomi pasar; (5) kemiskinan sementara terjadi akibat adanya perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman dan bencana alam atau dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Selain bentuk dan kelasnya, Mudaraj Kuncoro (2003) melihat kemiskinan dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu keadaan dimana penduduk hidup di bawah garis kemiskinan tertentu atau pendapatan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan atau berkaitan erat dengan distribusi pendapatan.

Melengkapi bentuk, kelas dan sisi kemiskinan, maka menurut Sach (2005) membedakan kemiskinan dalam tiga bentuk yakni (1) Kemiskinan ekstrim adalah situasi rumah tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Rumah tangga yang mengalami kemiskinan ekstrim berada dalam situasi kelaparan kronis, tidak mampu mengakses sarana kesehatan, tidak memiliki sumber air minum bersih dan sanitasi yang baik, tidak mampu menyekolahkan sebagian atau semua anak dalam rumah tangga, dan mungkin kekurangan tempat perlindungan dasar. (2) Kemiskinan moderat merujuk pada kondisi rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar namun hanya untuk kebutuhan dasar saja. (3) Kemiskinan relatif ditafsirkan sebagai pendapatan rumah tangga di bawah proporsi rata-rata pendapatan nasional. Rumah tangga yang termasuk dalam kemiskinan relatif di negara berpendapatan tinggi tidak memiliki akses terhadap benda-benda budaya, hiburan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan keuntungan lain bagi kelompok sosial atas. Mempertimbangkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat juga mengarah pada konsep kemiskinan relatif. Di negara-negara maju pemenuhan kebutuhan dasar tidak lagi menjadi persoalan rumah tangga, ada penekanan yang lebih

mendesak yaitu keterlibatan rumah tangga dalam dimensi sosial dan tidak menjauh dari “*mainstream*” masyarakat lain.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menurut sifatnya (Todaro,2008) yang terdiri atas: (1) kemiskinan absolut adalah jumlah masyarakat yang hidup di bawah tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal; (2) kemiskinan relatif adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat meskipun tingkat pendapatan sudah mampu mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum tetapi masih tetap jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya.

2.5 Mengukur Tingkat Kemiskinan

Terdapat dua pendekatan untuk mengukur kemiskinan yaitu pendekatan moneter dan pendekatan non moneter. Pada pendekatan moneter menggunakan faktor-faktor yang berhubungan dengan uang atau variabel-variabel yang dikonversi kedalam nilai uang sehingga pengukuran kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum yang berdasarkan pada nilai rupiah minimal untuk menebus sejumlah makanan (*food basket*) guna memenuhi kebutuhan kalori, ditambah pengeluaran bukan makanan (*non-food basket*). Sedangkan pendekatan non moneter menggunakan faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan uang yang diasosiasikan dengan kekurangan pada dimensi kesehatan, nutrisi, pendidikan, kepemilikan aset, peran sosial dalam masyarakat, ketidakberdayaan dan rendahnya penghargaan diri. Dengan demikian indikator yang digunakan dalam pendekatan nonmoneter adalah indikator yang melekat pada individu dan rumah tangga (Adji dkk, 2020).

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menghitung dan memetakan angka kemiskinan di Indonesia. Tingkat kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) atau melalui pendekatan moneter. Pendekatan tersebut memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi pengeluaran. Sehingga bisa dikatakan bahwa penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sementara GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, Pendidikan dan Kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis kemiskinan akan digunakan untuk menentukan seberapa banyak penduduk miskin. Persentase Penduduk miskin (P0) adalah persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Sehingga diperoleh tingkat kemiskinan dari perbandingan antara jumlah penduduk yang tergolong miskin dengan total jumlah penduduk. Selain itu, terdapat indikator berupa indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang dihitung dari kelompok miskin. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.6 Faktor Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dimana kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara baru saja merdeka setelah Perang Dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya

(Hardiman dan Midgley, dalam Kuncoro (1997). Penduduk negara tersebut miskin menurut Kuncoro (1997) karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz (1997) yaitu (1) tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya, keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja; (2) adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja; (3) keterbatasan sumber alam, suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin; (4) keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan ini akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan; (5) keterbatasan modal, seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan; (6) beban keluarga, seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkatkan tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil. Keseluruhan faktor tersebut saling memengaruhi dan sulit memastikan penyebab kemiskinan yang paling utama atau faktor mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Semua faktor tersebut merupakan *vicious circle* (lingkaran setan) dalam masalah timbulnya kemiskinan (Tulus, 1997).

Dan selanjutnya Sharp et al. (Kuncoro,1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) Ragnar Nurkse (1953) dalam (Kuncoro, 1997) menyatakan tentang teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*), adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas yang selanjutnya berdampak pada rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Dalam hal ini investasi dapat berupa investasi sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Kemudian lebih lanjut penyebab kemiskinan menurut suara orang miskin (BKPK, 2001) yaitu: (1) Keterbatasan pendapatan, modal, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk: modal sumber daya manusia, misalnya pendidikan formal, keterampilan, dan kesehatan yang memadai, modal produksi, misalnya lahan dan akses terhadap kredit, modal sosial, misalnya jaringan sosial dan akses terhadap prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan hidup di daerah yang terpencil; (2) kerentanan dan ketidakmampuan menghadapi guncangan-guncangan karena krisis ekonomi, kegagalan panen karena hama, banjir atau kekeringan, kehilangan pekerjaan (PHK), konflik sosial dan politik, korban kekerasan sosial dan rumah tangga, bencana alam (longsor, gempa bumi, perubahan iklim global), serta musibah seperti jatuh sakit, kebakaran, kecurian atau ternak terserang wabah penyakit; (3) tidak adanya suara yang mewakili dan terpuruk dalam ketidakberdayaan di dalam institusi negara dan masyarakat karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada perlindungan dari kejahatan, kesewenang-wenangan aparat, ancaman dan intimidasi, kebijakan publik yang tidak peka dan

tidak mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya posisi tawar masyarakat miskin.

Melihat secara keseluruhan, penyebab kemiskinan menurut Suharto (2005) dalam Adawiyah (2020) yaitu: (a) Faktor Individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam kehidupan; (b) Faktor sosial, kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin, misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menjebak seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi; (c) Faktor Kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultural atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan. Sikap-sikap “negatif” seperti malas, fatalisme atau menyerah pada Nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, sering ditemukan pada orang-orang miskin; (d) Faktor Struktural, berkaitan dengan struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Dimana sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan dan pekerja sektor informal terjerat oleh pajak dan iklim investasi yang lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Sedangkan menurut Bradshaw (2005) mengemukakan bahwa terdapat lima faktor penyebab kemiskinan yakni: (1) kemiskinan yang disebabkan kekurangan yang terdapat dalam diri individu itu sendiri, dalam hal ini individu dianggap bertanggung jawab atas kondisi kemiskinan mereka sendiri karena dianggap kurang bekerja keras atau kekurangan secara genetic seperti kurang pandai atau intelegensinya kurang; (2) kemiskinan disebabkan oleh sistem budaya miskin dan dukungan sub budaya miskin, yaitu kemiskinan diciptakan melalui transmisi kepercayaan, nilai-nilai, dan kemampuan sosial dari generasi ke generasi; (3) kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik dan distorsi sosial atau diskriminasi sehingga masyarakat memiliki kesempatan dan sumberdaya yang terbatas dalam upaya meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraannya; (4) kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis; dan (5) kemiskinan yang disebabkan oleh kumulatif dan siklus ketergantungan antar individu dan sumberdaya, dimana individu yang tidak memiliki sumberdaya tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas yang menyebabkan sedikitnya pembayaran pajak, seperti pendidikan dan bekerja yang saling terkait dimana sedikitnya kesempatan kerja menyebabkan terjadinya migrasi, penutupan toko *retail* dan penurunan pendapatan pajak setempat, yang mengakibatkan kondisi sekolah memburuk, sehingga pekerja memiliki keterampilan yang buruk dan perusahaan tidak dapat menyerap tenaga kerja setempat dengan kemampuan rendah. Siklus ini berulang pada level individu yakni sedikitnya pendapatan, sedikitnya tabungan dan berarti individu tidak dapat berinvestasi di bidang pelatihan, dan individu memiliki sedikit kemampuan untuk berinvestasi pada usaha sendiri. Tahap lain lingkaran kemiskinan adalah pandangan bahwa individu yang tidak memiliki pekerjaan dan sedikitnya pendapatan menyebabkan kurangnya rasa percaya diri, motivasi yang rendah dan depresi.

Nasikun dalam Suryawati (2005) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu: (a) *Policy includes processes* merupakan proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan; (b) *Socio-economic dualism* dimana negara koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor; (c) *Population growth* merupakan perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung; (d) *Resources management and the environment*, adanya unsur *mismanagement* sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas; (e) *Natural cycles and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus; (f) *The marginalization of women*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki; (g) *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang

memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan; (h) *Exploitative intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong seperti rentenir (lintah darat); (i) *Internal political fragmentation and civil strife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi kemiskinan; (j) *International processes*, bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Lebih spesifik kepada penyebab dari individu itu sendiri, menurut Siagian (2012), terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, yaitu: (1) Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari individu yang mengalami kemiskinan yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangan kemampuan, yang meliputi: fisik, intelektual, mental emosional atau temperamental, spiritual, sosial psikologis, keterampilan dan aset; (2) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi; terbatasnya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya pekerjaan formal, budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan, kondisi geografis yang sulit, tandus dan terpencil, serta kebijakan publik yang belum berpihak pada masyarakat miskin.

Faktor penyebab kemiskinan dari sisi pemerintah, yang mengelompokkan ke dalam beberapa faktor (Bappenas, 2018) yaitu: (1) Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi; (2) Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan; (3) Faktor Eksploitasi yang terjadi antar kelas, antar kelompok, antar wilayah, dan antar negara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antar negara maju dan negara berkembang; (4) Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan; (5) Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani tau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.

World Bank mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan keterampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk kedalam kemiskinan.

Dari penjelasan di atas, faktor individu yang berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan yang digunakan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori perangkap kemiskinan Chambers (1983) yaitu Dimensi keterasingan terdiri dari variabel tipe daerah tempat tinggal, dan tingkat pendidikan; Dimensi kelemahan jasmani terdiri dari variabel umur, dan keluhan kesehatan; Dimensi Kerentanan terdiri dari variabel jumlah anggota rumah tangga, variabel status pekerjaan, dan kepemilikan tabungan; Dimensi Ketidakberdayaan yaitu variabel kepemilikan jaminan kesehatan, dan akses perlindungan sosial.

2.6.1 Dimensi Keterasingan (Isolation) Memengaruhi Kemiskinan

Keterasingan atau isolasi terjadi karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil atau jangkauan komunikasi yang menopang kemiskinan, pelayanan dan bantuan pemerintah tidak sampai menjangkau mereka karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan (Chambers, 1932).

a. Tipe daerah tempat tinggal

Perbedaan daerah tempat tinggal menyebabkan perbedaan kegiatan utama penduduk. Kegiatan utama penduduk perdesaan di bidang agraris, sedangkan di perkotaan yang menjadi kegiatan utama penduduknya berpusat pada kegiatan sektor ekonomi sekunder meliputi industri, sektor ekonomi tersier di bidang pelayanan jasa. Selain perbedaan kegiatan utama dari daerah tempat tinggal, juga terdapat perbedaan pola pikir dan sudut pandang yang dianut penduduknya, antara lain nilai sosial, tingkat pendapatan, kemajuan teknologi, nilai budaya, jumlah penduduk, lingkungan dan pola hidup, keadaan alam, fasilitas, politik dan lain sebagainya (Kartika, 2018).

Teori kemiskinan dari Chambers dilandasi oleh adanya kesenjangan antara bentuk perekonomian perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*) yang selanjutnya menjadikan adanya kesenjangan berupa perbedaan standar hidup/kesejahteraan. Dan berkembang dengan adanya bentuk pemikiran mengenai kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan kemiskinan di pedesaan (*rural poverty*). Kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu urbanisasi atau perpindahan/migrasi penduduk dari desa menuju ke kota.

Rendahnya taraf kesejahteraan di desa serta daerah perkotaan umumnya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki fasilitas lebih lengkap dibandingkan dengan pedesaan. Ketersediaan fasilitas ekonomi di perkotaan merupakan sarana kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan sebagai sumber pendapatan rumah tangga yang mendorong adanya perpindahan atau migrasi sumberdaya dari desa menuju ke kota. Keterbatasan sektor-sektor formal di perkotaan dalam menyerap sumber daya ditambah dengan adanya kesenjangan keterampilan/kemampuan teknis masyarakat dari pedesaan menyebabkan sebagian besar dari penduduk yang bermigrasi tersebut bekerja di sektor informal atau menjadi pengangguran baru di perkotaan. Daya tampung lahan di perkotaan yang relatif terbatas menyebabkan sebagian besar dari mereka lebih banyak menempati kawasan-kawasan yang tidak layak huni.

Beberapa penelitian terkait pengaruh daerah tempat tinggal dan kemiskinan menyebutkan bahwa penduduk miskin pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, dan rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan status miskin lebih tinggi daripada yang tinggal di perkotaan (Todaro dan Smith, 2006; Rini dan Sugiaharti, 2016), kemudian diperkuat oleh penelitian Krisnawati di Bali yang menyatakan bahwa perempuan yang tinggal di daerah pedesaan cenderung berstatus miskin dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (Krisnawati, 2016). Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Direja (2021) yang dilakukan di Provinsi Banten, yang menyatakan bahwa daerah tempat tinggal rumah tangga menunjukkan hasil negatif yang berarti jika rumah tangga tersebut tinggal di daerah pedesaan maka akan mengurangi kemungkinan mereka menjadi miskin, hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada peningkatan penduduk miskin di pedesaan.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya, sebab dapat memengaruhi cara berfikir. Dengan pendidikan seseorang yang tadinya statis dapat menjadi dinamis, dan dari lingkungan yang tradisional menjadi lebih modern. Selain itu pendidikan dapat memberikan kontribusi produktivitas tenaga kerja dan alokasinya sehingga dapat meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Dengan kata lain pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan output yang lebih tinggi dengan jumlah input yang tetap dan dapat mengakses informasi sehingga dapat mengelola pengeluaran untuk produksi dan memilih alternatif usaha (Sheyoputri dan Azuz, 2019).

Hal ini juga sejalan dengan Todaro (2006) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan. Pada rumah tangga, tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh kepala rumah tangga merupakan hal yang sangat vital. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penghasilan, dan kepala rumah tangga merupakan sumber penghasilan utama dalam rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Sehingga pendidikan yang telah ditempuh oleh kepala rumah tangga menjadi faktor yang penting dalam menentukan kesejahteraan rumah tangga.

Beberapa penelitian terkait pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan perempuan menyatakan bahawa pendidikan yang lebih baik akan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesejahteraannya. Semakin rendah pendidikan perempuan maka kecenderungan berstatus miskin semakin tinggi (Hastuti, 2014; Krisnawati 2016; Nisak dan Sugiharti, 2020; Jayathilaka and Wijesinghe, 2020).

2.6.2 Dimensi Kelemahan Jasmani Memengaruhi Kemiskinan

Kelemahan jasmani suatu rumah tangga mendorong orang ke arah kemiskinan melalui beberapa cara; tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat

rendah, tidak mampu menggarap lahan yang luas, atau bekerja lebih lama, melalui upah yang rendah bagi kaum wanita atau orang yang lemah, serta pengurangan atau kelemahan karena sakit. Tubuh yang lemah juga sering membuat seseorang tersisih karena tidak ada waktu atau tidak kuat mengikuti pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat, terutama bagi wanita yang berkewajiban untuk mengurus anak-anak. Jasmani yang lemah memperpanjang kerentanan seseorang karena terbatasnya kemampuan untuk mengatasi krisis atau keadaan darurat, misalnya dengan bekerja lebih keras, mencari kegiatan baru atau bantuan. Tubuh yang lemah mengakibatkan orang tidak berdaya karena kekurangan tenaga dan waktu, untuk melakukan unjuk rasa, berorganisasi dan politik, orang yang kelaparan dan sakit-sakitan tidak akan berani berbuat macam-macam (Chambers 1932).

Tingkat daya tahan jasmani seseorang tentunya berbeda-beda, maka tingkat kelemahan jasmani dapat diukur dari umur dan masalah daya tahan tubuh yang didekati dengan keluhan kesehatan.

a. Umur

Umur memengaruhi fungsi biologis dan psikologis seseorang. Umur seseorang akan memengaruhi kemampuan fisik dan cara berfikir. Dimana semakin tua maka kemampuan kerjanya relatif menurun, sehingga produktivitas seseorang dalam bekerja untuk menghasilkan pendapatan sangat dipengaruhi oleh faktor umur. Mengingat umur produktif memengaruhi cara berpikir dan keadaan fisik dalam bekerja yang pada akhirnya bermuara pada tingkat pendapatan yang diperoleh. Walaupun disisi lain, seseorang yang berusia tua lebih banyak berpengalaman dibandingkan yang relatif muda, sedangkan umur muda, biasanya bersifat dinamis, yakni lebih berani menanggung resiko untuk memperoleh pengalaman. Seseorang yang relatif tua, mempunyai kapasitas pengolahan usaha yang lebih matang dan memiliki banyak pengalaman sehingga berhati-hati dalam bertindak (Sheyoputri dan Azuz, 2019).

Hasil penelitian Direja (2021) di Banten menemukan bahwa variabel umur menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan yang artinya semakin bertambah usia kepala rumah tangga maka akan mengurangi kemungkinan rumah tangga menjadi miskin, sedangkan menurut Salam et al (2021) dalam penelitiannya di Jawa Timur menemukan bahwa variabel umur tidak signifikan

terhadap status kemiskinan yang artinya tidak ada perbedaan pengaruh umur baik umur muda (produktif) maupun umur tua (tidak produktif) terhadap kemiskinan rumah tangga, kemudian lebih lanjut penelitian Nisak dan Sugiharti (2020) mengenai kemiskinan perempuan di Indonesia menemukan bahwa variabel umur menunjukkan arah positif yang menggambarkan bahwa usia kepala keluarga yang tidak produktif memiliki kecenderungan untuk membuat rumah tangga menjadi lebih miskin.

b. Keluhan Kesehatan

Kesehatan memengaruhi tingkat fungsional seseorang, baik dari segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosiokultural. Sama halnya pendidikan, kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan sederhana, dan merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Kondisi kesehatan yang buruk menyebabkan berkurangnya produktivitas. Produktivitas yang menurun mengakibatkan semakin terbatasnya penghasilan yang diperoleh (Hastuti, 2014).

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk yang mengalami gangguan kesehatan adalah mereka yang karena keluhan kesehatan yang dialaminya, menyebabkan tidak dapat melakukan kegiatan secara normal (bekerja, sekolah, kegiatan sehari-hari) sebagaimana biasanya. Tingkat kesakitan didekati dengan keluhan kesehatan yang merupakan salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk. Indikator tingkat kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu.

Hasil penelitian Syahrani et al (2021) menyatakan bahwa keluhan kesehatan memengaruhi kemiskinan dimana pada dasarnya, penduduk miskin yang terjerat kemiskinan cenderung memiliki pola hidup yang tidak sehat dan rentan terkena penyakit. Kemudian, akibat kemiskinan tersebut, mereka tidak dapat membayar biaya perawatan dan pengobatan ketika jatuh sakit. Sementara bagi masyarakat dengan tingkat kesehatan yang lebih baik, mampu menekan

angka kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan oleh kondisi orang yang sehat dapat beraktivitas dengan lebih produktif terutama untuk bekerja dan memperoleh pendapatan.

2.6.3 Dimensi Kerentanan Memengaruhi Kemiskinan

Kerentanan adalah salah satu mata rantai yang banyak mempunyai jalinan. Faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan, berkaitan dengan kelemahan jasmani untuk menangani keadaan darurat, waktu dan tenaga ditukarkan dengan uang, dan ketergantungan terhadap majikan atau orang yang dijadikan gantungan hidupnya (Chambers,1983).

Kesiapan dalam menghadapi kebutuhan sifatnya mendadak, seperti sakit, kecelakaan, kelaparan, kematian, hajatan, kebakaran, bencana alam yang kesemuanya jarang sekali diperhitungkan oleh penduduk miskin, seberapa besar intensitas meminta bantuan saudara, teman, atau pihak penyalur kredit seperti perbankan dalam bentuk hutang piutang, dan sering gagal dalam usahanya.

Kerentanan dalam penelitian ini didekati dengan jumlah anggota rumah tangga bagaimana rentan terhadap pemenuhan makanan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan makanan dan asupan gizi, kemudian status pekerjaan yang berkaitan dengan waktu dan tenaga serta penghasilan dan ketergantungan terhadap majikan dalam penghasilan serta kepemilikan tabungan yang berkaitan dengan kesiapan dalam menghadapi kebutuhan yang sifatnya mendadak.

a. Jumlah anggota rumah tangga

Rumah tangga miskin cenderung mempunyai jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak, karena rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kematian anak pada rumah tangga miskin juga relatif tinggi akibat kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak mereka. Jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak berhubungan dengan jumlah tanggungan yang meningkat. Besar kecilnya jumlah anggota

rumah tangga sangat menentukan jumlah pengeluaran/konsumsi rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota rumah tangga akan memengaruhi pembentukan rumah tangga miskin (Sheyoputri dan Azuz, 2019).

Menurut Hastuti (2014) semakin banyak anak tanpa didukung kemampuan ekonomi menjadi beban berat bagi rumah tangga. Jumlah tanggungan yang banyak, diperlukan modal lebih besar untuk setiap anggota rumah tangga mulai dari biaya pendidikan, perawatan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan konsumsi, kemudian diperkuat oleh beberapa penelitian yang menyatakan bahwa variabel jumlah anggota rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan perempuan, dimana semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka kecenderungan perempuan untuk berstatus miskin semakin meningkat (Krisnawati, 2016; Nisak dan Sugiharti, 2020).

b. Status pekerjaan

Barthos (2001) menyatakan bahwa pada dasarnya semakin tidak menentu seseorang melakukan kegiatan bekerja, pada umumnya mereka merupakan bagian masyarakat yang tidak beruntung, karena tidak memiliki pendapatan yang tetap, jika dibandingkan dengan pekerja yang termasuk kedalam sektor formal umumnya pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang mengandalkan produksi barang dan jasa dengan pendapatan yang tetap. Bahkan untuk karyawan pemerintah mendapatkan pensiun.

Pekerja formal dianggap lebih memiliki faktor kepastian dibandingkan pekerja informal. Selain itu pada publikasi mengenai ekonomi ekonomi informal di Indonesia pada tahun 2010, ILO menyebutkan bahwa korelasi antara kemiskinan dan pekerja informal di Indonesia pada tahun 2009 ternyata cukup moderat, selain itu relasi antara kemiskinan dan pasar tenaga kerja informal memiliki relasi berupa terciptanya sebuah lingkaran setan utamanya bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki keterampilan bekerja di sektor formal (Pangestu, 2019). Namun hal ini tak sejalan dengan penelitian Krisnawati (2016) dimana perempuan yang bekerja di sektor informal cenderung berstatus tidak miskin dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di sektor formal.

c. Kepemilikan Tabungan

Faktor ekonomi berupa keterbatasan terhadap kepemilikan aset keuangan seperti tabungan menjadi faktor kunci meningkatnya resiko kerentanan kemiskinan (Matul M, 2009). Terutama bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki tabungan. Sebab, mereka akan kesulitan mendapatkan dana untuk pendidikan atau merintis usaha di tahun mendatang, selain itu mereka juga tidak mampu menghadapi guncangan ekonomi seperti bencana alam dan kenaikan harga (D Narayan & Petesh, 2007; Haughton S, 2015).

Tabungan adalah salah satu bentuk produk keuangan yang tergolong dalam aset likuid. Artinya, aset berupa tabungan dapat diubah menjadi uang kontan dalam waktu yang relatif cepat dengan nilai yang stabil. Tabungan dinilai dapat mengontrol pengeluaran rumah tangga dan meringankan dampak negatif saat terjadi guncangan pendapatan, sehingga mengurangi resiko rumah tangga mengalami kerentanan kemiskinan (Philip & Rayhan, 2004). Jika dikaitkan dengan teori Chambers, aset finansial khususnya tabungan termasuk dalam lima besar aset yang berkontribusi terhadap kehidupan berkelanjutan untuk mengurangi resiko jatuh miskin di tahun mendatang. Penelitian Wei et al (2021) di Bangladesh menyatakan bahwa kepemilikan aset berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun berbeda dengan hasil penelitian Meidiana dan Marhaeni (2019) di Bali yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan menurut penelitian Adnyani dan Sugiharti (2019) menyatakan bahwa kepemilikan tabungan memiliki arah yang negatif terhadap kemungkinan rumah tangga berstatus miskin, yang artinya rumah tangga yang memiliki tabungan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk jatuh miskin pada tahun mendatang dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki tabungan.

2.6.4 Dimensi Ketidakberdayaan Memengaruhi Kemiskinan

Ketidakberdayaan mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, antara lain yang terpenting adalah pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya, seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, setidak-tidaknya terhalang atau terhambat memperoleh bantuan hukum, serta membatasi kemampuannya untuk menuntut upah yang

layak atau menolak suku bunga; menempatkan dirinya pada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi jual beli, dan mereka tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap pemerintah dalam mengambil keputusan (Chambers, 1983).

Ketidakberdayaan dalam penelitian ini didekati dengan akses kepala rumah tangga terhadap bantuan pemerintah seperti kepemilikan jaminan kesehatan dan aksesibilitas jaminan perlindungan sosial.

a. Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan adalah jaminan yang diberikan oleh, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun swasta, untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan umumnya menjamin pemegang manfaat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau. Penduduk miskin dan rentan umumnya memiliki kemampuan membayar yang rendah. Keberadaan jaminan kesehatan akan mengurangi halangan dalam bentuk biaya bagi penduduk miskin dan rentan. Sehingga, penduduk miskin dan rentan dapat menjaga kesehatannya yang akan berpengaruh langsung pada produktivitas mereka (Nainggolan V et al.,2022).

b. Akses Jaminan Perlindungan Sosial

International Labour Organization (ILO) mengungkapkan bahwa perlindungan sosial memberikan ketersediaan jaminan sosial khususnya golongan rentan, diikuti perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sepanjang siklus hidupnya (Habibullah, 2019). Sebagian besar literatur menekankan tujuan perlindungan sosial untuk melindungi pendapatan dan konsumsi masyarakat disebabkan penyakit, pengangguran atau kecacatan, memerangi kemiskinan dengan memastikan akses kepada kebutuhan pokok dan meningkatkan peluang pendapatan individu dengan memberikan akses kredit/pembiayaan serta menciptakan pasar tenaga kerja (Robalino et al, 2012).

Penelitian Prayitno (2018) memfokuskan penelitian pada pengaruh program perlindungan sosial terhadap pendapatan rumah tangga miskin pada Provinsi Jawa Timur yang menyimpulkan bahwa program tersebut secara efektif bekerja untuk meminimalisasi tingkat kemiskinan meskipun dalam efektivitas yang rendah hal yang sama diungkapkan oleh Sinaga et al (2022) bahwa program

perlindungan sosial efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin dan program perlindungan sosial yang paling berpengaruh terhadap penekanan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara adalah program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program Kartu Prakerja. Kemudian penelitian Gultom et al. (2020) meneliti program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) serta PKH (Program Keluarga Harapan) terhadap usaha pengentasan masyarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan linier berganda. Hasil analisis membuktikan bahwa BPNT berdampak positif serta menunjukkan hasil signifikan terhadap usaha pengentasan bertambahnya masyarakat miskin, sementara PKH memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap usaha pengurangan masyarakat miskin.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka penyusunan penelitian yang dikerjakan serta merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Terdapat beberapa penelitian terkait kemiskinan perempuan dan peran perempuan dalam mengurangi kemiskinan seperti Arjani (2007) yang melakukan penelitian di Bali, menyimpulkan bahwa Kondisi kemiskinan lebih banyak dialami dan dirasakan oleh kaum perempuan, kemiskinan yang dialami oleh perempuan bersifat spesifik sehingga diperlukan penanganan yang khusus seperti hal pendekatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat gender, dan menurutnya kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan tidak hanya kemiskinan ekonomis, tetapi juga kemiskinan multidimensional seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, politik, ekonomi, informasi, kesehatan, dan lain-lain.

Sama dengan Arjani, Antari juga melakukan penelitian di Bali tetapi lebih spesifik di Kota Denpasar pada tahun 2008 dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda menghasilkan bahwa faktor umur, tingkat Pendidikan, jam kerja, jumlah anggota rumah tangga, modal finansial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perempuan miskin. Jam kerja dan modal finansial memberikan dampak dan pengaruh yang positif terhadap pendapatan perempuan miskin, sedangkan umur, tingkat Pendidikan, dan jumlah anggota rumah tangga tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan perempuan miskin (Antari, 2008).

Sementara itu penelitian Kamar (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan data makro, dan menyimpulkan bahwa perubahan untuk memerdekakan perempuan tidak hanya dari satu sektor saja. Perubahan harus dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, Pendidikan perempuan, serta iklim dan tatanan sosial yang ramah terhadap perempuan. Pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk menekan angka kemiskinan karena pemberdayaan merupakan proses yang pada saat bersamaan menjadi tujuan untuk membuka akses perempuan ke keadilan.

Kemudian penelitian terkait kemiskinan kepala rumah tangga perempuan di negara lain seperti Javed dan Asif (2011) melakukan penelitian di Pakistan dengan menggunakan Analisis Regresi Logistik menghasilkan bahwa kepala rumah tangga perempuan dan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh positif terhadap kemiskinan, jumlah pendapatan, jumlah konsumsi, serta status kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Daerah tempat tinggal, tingkat Pendidikan, dan jumlah pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Sementara itu melihat dari sisi pekerjaan dan waktu dalam bekerja kepala rumah tangga perempuan miskin, Noh Hye jin dan Kyo-seong kim (2015) melakukan penelitian di Korea Selatan, dengan menggunakan dekomposisi indeks Theil terhadap penggunaan waktu dalam bekerja dan kemiskinan waktu. Hasil analisis menunjukkan bahwa perempuan menyumbangkan jumlah jam kerja yang lebih besar untuk kelangsungan hidup rumah tangga dibandingkan laki-laki. Dan kelompok yang paling banyak menghabiskan waktu untuk bekerja adalah perempuan miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa feminisasi kemiskinan terkait erat dengan feminisasi tenaga kerja. Selain itu ditemukan bahwa kesenjangan gender dalam hal jumlah jam kerja tidak hanya dirasakan oleh perempuan yang tinggal di rumah tangga miskin, tetapi juga oleh perempuan yang tidak hidup dalam kemiskinan. Hal ini terlihat bahwa dari jumlah jam kerja tak dibayar perempuan sebanyak enam hingga tujuh kali lebih banyak daripada laki-laki. Selain itu perempuan yang tidak miskin memakai waktu untuk bekerja tak dibayar lebih lama dibandingkan dengan perempuan miskin, jelas bahwa perempuan miskin menghabiskan waktu yang lebih sedikit untuk pekerjaan yang tak berbayar, karena waktunya lebih banyak digunakan untuk mencari nafkah, perempuan miskin tidak mempunyai pilihan selain menyusun strategi untuk meningkatkan pendapatan dengan bekerja dengan waktu yang lebih lama, karena mereka memahami bahwa

hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mencegah dan mengentaskan kemiskinan.

Lebih lanjut lagi terkait pekerjaan kepala rumah tangga perempuan miskin dan faktor lainnya yang berhubungan dengan sektor ekonomi, maka penelitian yang dilakukan Krisnawati (2016) menyatakan bahwa kemiskinan dan pemiskinan perempuan secara jelas terlihat dari sektor ekonomi. Perempuan yang hidup dalam kemiskinan selalu sulit untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi. Untuk bekerja kaum perempuan tidak diakui dan dihargai. Dalam bekerja pun, perempuan mendapat upah jauh lebih rendah dari apa yang diperoleh laki-laki. Seorang perempuan yang turut mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, atau yang menjadi kepala keluarga dari kelompok miskin, lebih miskin dibandingkan laki-laki dari kategori sama kemudian bahwa daerah tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap status ekonomi perempuan. Perempuan yang tinggal di perdesaan cenderung berstatus miskin dibandingkan dengan perempuan di daerah perkotaan. Kemudian variabel tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap status ekonomi perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan maka kecenderungan untuk berstatus miskin semakin rendah dan jumlah anggota rumah tangga merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap status ekonomi perempuan, semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka kecenderungan perempuan untuk berstatus miskin semakin meningkat.

Dan untuk melihat lebih jauh lagi terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepala rumah tangga perempuan menjadi miskin ditemukan pada penelitian Milazzo dan Dvande Walle (2017) di Afrika yang menemukan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan cenderung lebih miskin, dan perubahan karakteristik kepala rumah tangga perempuan berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Afrika sejak tahun 1990. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan demografi dan karakteristik khususnya perubahan dalam perilaku pernikahan yaitu usia perempuan pada perkawinan pertama, pembentukan keluarga, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu Penelitian Achini dan Wijesinghe (2020) melakukan penelitian di Sri Lanka menggunakan Analisis Regresi Logistik, dengan menggunakan faktor selain ekonomi yaitu sosial demografi dan budaya, yang menghasilkan bahwa kepala rumah tangga perempuan lebih miskin dibandingkan dengan kepala rumah

tangga laki-laki. Dan variabel jenis kelamin kepala rumah tangga, etnik, status pekerjaan, status perkawinan, dan daerah tempat tinggal secara signifikan berpengaruh terhadap angka kemiskinan rumah tangga.

Dan selanjutnya terkait kemiskinan kepala rumah tangga perempuan yang lebih spesifik mengenai gender dengan menggabungkan dan membandingkan antara data individu dan data secara makro sehingga menghasilkan dua model yang dapat digunakan baik secara individu maupun secara makro, Nisak S Seli (2020) dalam penelitiannya di Indonesia terkait kemiskinan perempuan yang diakibatkan oleh ketimpangan gender menunjukkan bahwa perempuan miskin lebih banyak ditemukan pada rentang usia 60 tahun ke atas dengan status janda atau belum menikah, menggunakan analisis regresi logit dengan dua model, yang pertama model untuk individu perempuan ditemukan bahwa variabel kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan terakhir perempuan, partisipasi kerja perempuan, dan status bekerja perempuan terbukti signifikan secara statistik dalam memengaruhi kemiskinan individu perempuan baik secara parsial maupun keseluruhan. Sedangkan untuk model yang kedua ditemukan bahwa variabel kepala rumah tangga, tingkat pendidikan terakhir kepala rumah tangga, kondisi sanitasi, kualitas air minum/mandi, sumber penerangan, dan jumlah anggota rumah tangga terbukti signifikan secara statistik memengaruhi kemiskinan rumah tangga yang dikepalai perempuan.

Selanjutnya penelitian terkait peran perempuan dalam mengurangi kemiskinan di Bangladesh dilakukan oleh Wei wei et.all (2021), meneliti pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap pengurangan kemiskinan dan berfokus pada keterbatasan rumah tangga, dalam hal pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kepemilikan aset, kekuatan pengambilan keputusan terhadap kesehatan dan pendidikan anak, serta akses terhadap fasilitas kesehatan, telah menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap kemiskinan pendapatan dan kemiskinan multidimensi. Perempuan yang berpendidikan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, pengambilan keputusan dalam rumah tangga, dan mengendalikan aset, yang membantu memberdayakan mereka. Perempuan yang berpendidikan lebih sadar akan hak-hak mereka serta kesejahteraan anak-anak dan anggota keluarga mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan pendapatan rumah tangga dan kemiskinan multidimensi. Perempuan yang bekerja dan menghasilkan

pendapatan memiliki kebebasan serta mereka menghadapi kekerasan dalam rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan yang tidak bekerja.

Adapun ringkasan-ringkasan penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan kepala rumah tangga perempuan secara lengkap disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Peta Studi Penelitian-penelitian Sebelumnya

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3
Arjani, Ni luh (2007)	Feminisasi Kemiskinan Dalam Kultur Patriarki	Menggunakan Analisis Deskriptif, hasil penelitian menunjukkan Indikator pendidikan, tingkat partisipasi kerja menggambarkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, politik, ekonomi, informasi dan kesehatan menyebabkan perempuan menjadi miskin
Antari, Sagung (2008)	<i>The Analysis of Several Influencing Factors to The Women's Income (Mother of Household) at Poor Family in Sesetan Village, South Denpasar Subdistrict, Denpasar City</i>	Menggunakan analisis regresi berganda menghasilkan bahwa umur, tingkat pendidikan, jam kerja, jumlah anggota rumah tangga, modal finansial berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan perempuan miskin.
Kamar, S. Amirul (2010)	Peranan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, iklim dan tatanan sosial dapat membuka akses perempuan keadilan untuk menekan angka kemiskinan.
Javed, and Ayesha Asif (2011)	<i>Female Households and Poverty: A Case Study of Faisalabad District.</i>	Menggunakan analisis regresi logistik menemukan bahwa kepala tangga perempuan, jumlah anggota rumah tangga, jumlah pendapatan, jumlah konsumsi, status kepala rumah tangga,

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3
		daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan
Noh, Hyejin and Kyo-Seong Kim. (2015)	<i>Revisiting the 'Feminization of Poverty' in Korea: Focused on Time Use and Time Poverty</i>	Menggunakan analisis waktu dengan dekomposisi indeks theil, dengan variabel jenis kelamin, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan mempunyai hubungan dengan kemiskinan perempuan dan terdapat kesenjangan gender dalam hal penggunaan waktu bekerja, dimana perempuan miskin lebih banyak menggunakan waktunya untuk bekerja menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan perempuan yang tidak miskin.
Krisnawati, T., & Yasa, N. M. (2016)	Pengaruh Variabel Ekonomi Dan Sosial Demografi Terhadap Status Ekonomi Perempuan Di Kabupaten Jembrana	Menggunakan analisis regresi logistik mendapatkan hasil variabel ekonomi (pendapatan, jam kerja, lapangan pekerjaan, status pekerjaan) dan sosial demografi (daerah tempat tinggal, jumlah anggota rumah, tingkat pendidikan) berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan perempuan.
Milazzo Anna Maria & Dvande Walle (2017)	<i>Women Left Behind ? poverty and Headship in Africa</i>	Penelitian ini menemukan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan cenderung lebih miskin, dan perubahan karakteristik kepala rumah tangga perempuan berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan. Perubahan tersebut yaitu usia perempuan pada perkawinan pertama, pembentukan keluarga, kesehatan dan pendidikan
Achini Jayathilaka, Wijesinghe M.D.J.W. (2020)	<i>Female Headship and Poverty in Sri Lanka: A household level Analysis</i>	Menggunakan analisis regresi logistik, variabel jenis kelamin kepala rumah tangga, etnik, status pekerjaan, status perkawinan, dan daerah tempat tinggal

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	2	3
		secara signifikan berpengaruh terhadap angka kemiskinan rumah tangga
Nisak S Seli & Sugiharti Lilik. (2020)	<i>Gender Inequality and Women Poverty in Indonesia</i>	Menggunakan analisis regresi logit ditemukan bahwa variabel individu yaitu kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan terakhir, partisipasi kerja, status bekerja, kondisi sanitasi, kualitas air minum/mandi, sumber penerangan dan jumlah anggota rumah tangga secara signifikan memengaruhi kemiskinan
Wei Wei, et.all. (2021)	<i>The Influence of women's empowerment on Poverty Reduction in the Rural Areas of Bangladesh: Focus on Health, Education and Living Standard</i>	Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kepemilikan aset, kekuatan pengambilan keputusan dan pendidikan anak, serta akses terhadap fasilitas kesehatan menurunkan kemiskinan pendapatan dan kemiskinan multidimensi. Kemudian adanya keterkaitan antara pendidikan dan variabel bekerja dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka dan peta penelitian terdahulu, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengangkatan isu kemiskinan kepala rumah tangga perempuan sebagai salah satu bentuk adanya ketidakadilan gender, dimana menggunakan faktor individu yang terdiri dari karakteristik sosial-ekonomi dan demografi kepala rumah tangga perempuan dengan pendekatan teori perangkap kemiskinan oleh Chambers (1983). Selain itu, belum adanya penelitian terkait kemiskinan perempuan di Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi juga menjadi salah satu kebaruan dari penelitian ini.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan terhadap faktor-faktor dan ukuran-ukuran yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka maupun penelitian terdahulu dan sesuai dengan pendekatan teori perangkap kemiskinan Chambers (1983). Variabel predictor/independen yang digunakan adalah daerah tempat tinggal, tingkat pendidikan, umur, keluhan

kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan, kepemilikan tabungan, kepemilikan jaminan kesehatan dan akses jaminan perlindungan sosial sementara variabel respon/dependen yang diteliti adalah status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan.

2.8. Kerangka Pikir Penelitian

Peningkatan kontribusi dan pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk mendukung tujuan pembangunan, dengan meningkatkan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan (Yildiz,2016). Dikalangan orang miskin, perempuan adalah kelompok termiskin dan mencerminkan kuatnya budaya patriarki yang memorduakan perempuan dan ketimpangan gender memperparah kemiskinan perempuan dan sebaliknya, bahwa kemiskinan berkontribusi terhadap semakin tajamnya ketimpangan gender (Indraswari,2009).

Kemiskinan di dunia ini wanita yang menjadi korban paling menderita, wanita setiap hari harus menghadapi permasalahan yang begitu banyak dalam hidupnya, peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga berarti mereka harus mampu menjadi pendamping suami, mampu merawat dan mendidik anak. Berangkat dari berbagai pendapat para ahli terkait konsep kemiskinan, maka dapat dinyatakan bahwa fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari dan merupakan akar kemiskinan yang akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional karena kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya dan politik).

Dalam penelitian ini, bentuk kemiskinan yang digunakan yaitu kemiskinan absolut, menyatakan bahwa suatu keadaan dimana penduduk hidup di bawah garis kemiskinan tertentu atau pendapatan yang diperoleh berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain: pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan (Kuncoro,2003). Dengan menggunakan pengukuran pendekatan moneter dari sisi pengeluaran maka

diperoleh penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS,2022).

Adanya anggapan budaya paternalistik yang memomorduakan peran wanita menjadikan mereka seringkali dipandang sebelah mata dalam masyarakat sosial. Hal ini yang menjadikan terbatasnya akses-akses pendidikan ataupun ekonomi serta fasilitas sosial sulit bagi perempuan (Arjani,2007). Daerah tempat tinggal, rendahnya tingkat pendidikan, umur, keluhan kesehatan, jumlah anggota rumah tangga, status pekerjaan, kepemilikan tabungan, kepemilikan jaminan kesehatan dan akses jaminan perlindungan sosial, kemungkinan besar menjadi sebab utama kemiskinan itu terjadi. (Nisak, 2020; Achini, 2020; Milazzo, 2017; Krisnawati, 2016; Noh Kim, 2015; Siagian, 2012; Javed, 2011; Antari, 2008)

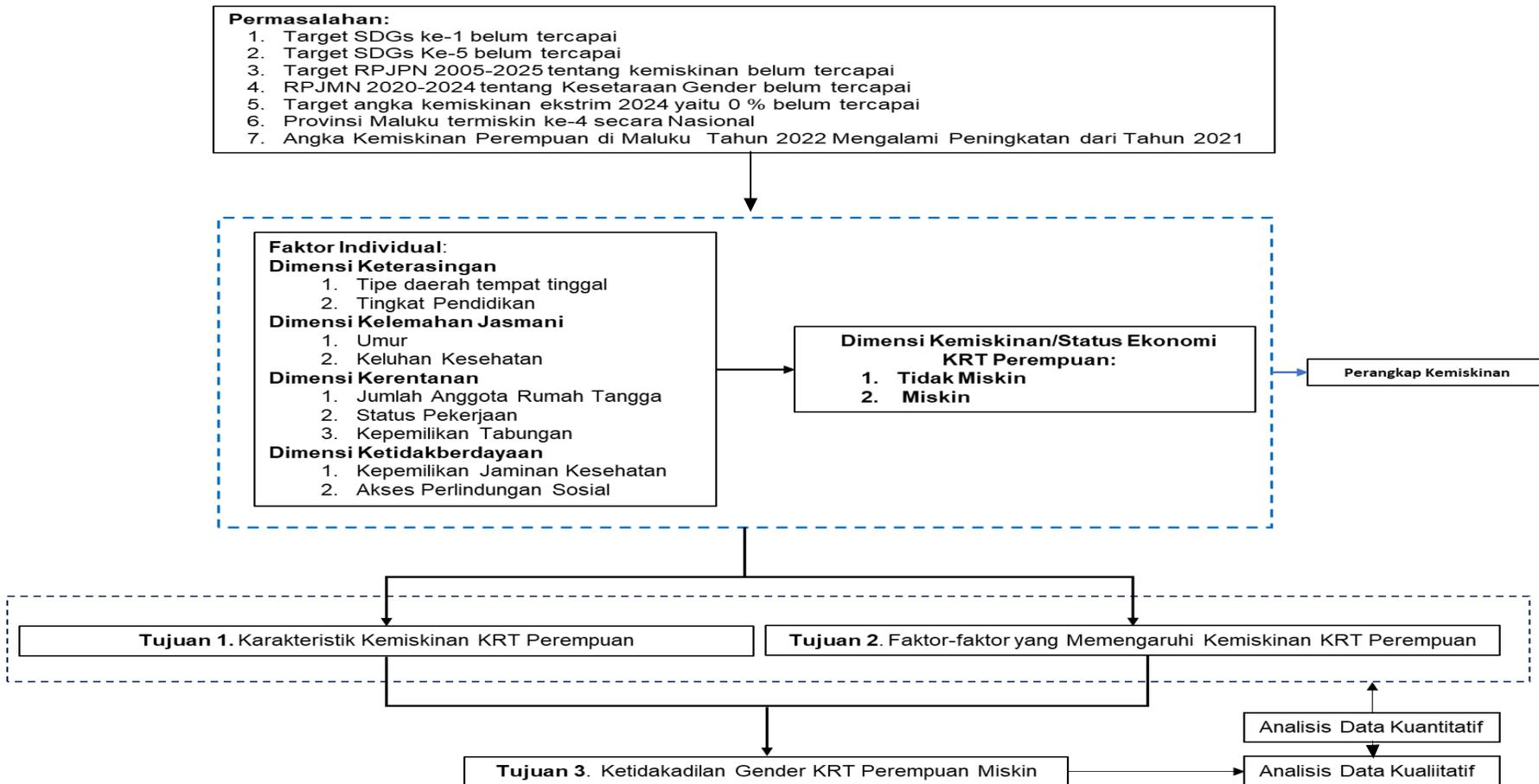
Daerah tempat tinggal yang memengaruhi keadaan dan kemajuan suatu wilayah, memengaruhi pola pikir masyarakatnya serta norma sosial yang ada pada daerah tersebut (Todaro, 2011), kemudian keterbatasan kemampuan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh kaum wanita menyebabkan perilaku serta kebiasaan setiap hari-harinya akan tetap sama seperti yang diajarkan dan diturunkan, hal ini sejalan dengan penelitian Rahmadhanty (2021) bahwa semakin rendah pendidikan kepala rumah tangga maka semakin tinggi kecenderungan anak yang tinggal bersama KRT tersebut akan mengalami kemiskinan.

Dengan pendidikan dan pengetahuan yang rendah yang dimiliki perempuan membuat mereka mengalami marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, namun demi kelangsungan diri dan keluarga, pihak wanita bekerja pada sektor informal, sektor pertanian atau buruh tani, perdagangan dan jasa dan buruh pabrik ataupun pada ranah domestik. Perempuan memerankan sejumlah peran, baik sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga (beban ganda). Perempuan harus menanggung sejumlah anggota rumah tangga, dengan segala keterbatasan yang dimiliki baik dari pendidikan, dan keterampilan serta fisik yang lemah/umur yang sudah tua mengakibatkan mereka masuk dalam perangkap kemiskinan. (Nisak, 2020; Achini, 2020; Milazzo, 2017; Krisnawati, 2016; Noh Kim, 2015; Javed, 2011; Antari, 2008). Perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin terjebak dalam suatu perangkap kemiskinan yaitu kemiskinan, keterasingan/ keterisolasian, kelemahan jasmani, kerentanan dan ketidakberdayaan sehingga mereka menempuh berbagai macam strategi dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan bertahan hidup walaupun hal tersebut

menentang konstruksi gender yang ada di Tengah masyarakat, sehingga mereka mengalami ketidakadilan gender.

Pentingnya mengetahui faktor-faktor apa saja yang secara signifikan memengaruhi kemiskinan kepala rumah tangga perempuan agar dapat dijadikan rujukan terkait apa yang diperbaiki oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan kepala rumah tangga perempuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan ataupun dapat keluar dari perangkap kemiskinan baik untuk dirinya ataupun untuk generasi selanjutnya, yang dapat dilakukan melalui uji statistik terhadap data sekunder yang tersedia dan diperkuat dengan hasil *indepth interview*. Sedangkan ketidakadilan gender yang dialami kepala rumah tangga perempuan diperoleh melalui analisis data kualitatif hasil *indepth interview* terhadap kepala rumah tangga perempuan.

Berdasarkan penjabaran di atas, adapun skema kerangka pikir penelitian yang dikemukakan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian, Faktor yang Memengaruhi KRT Perempuan menjadi Miskin dan Ketidakadilan Gender yang dialami KRT Perempuan

2.9. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pikir yang ada, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Diduga tipe daerah tempat tinggal berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan yang bertempat tinggal di daerah perdesaan diduga akan berpeluang lebih besar untuk memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah perkotaan
2. Diduga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan dengan tingkat Pendidikan yang lebih rendah diduga akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang memiliki tingkat Pendidikan tinggi.
3. Diduga umur berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan pada kelompok umur yang lebih tua/tidak produktif diduga akan berpeluang lebih besar untuk memiliki status miskin dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih muda/produktif.
4. Diduga keluhan kesehatan berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan yang memiliki keluhan kesehatan akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki keluhan kesehatan.
5. Diduga jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan dengan jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak diduga akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih sedikit.
6. Diduga status pekerjaan berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan yang bekerja di sektor informal diduga akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang di sektor formal.
7. Diduga kepemilikan tabungan berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan yang tidak memiliki tabungan diduga akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang memiliki tabungan.
8. Diduga kepemilikan jaminan kesehatan berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan yang tidak memiliki

jaminan kesehatan diduga akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang memiliki jaminan kesehatan.

9. Diduga akses perlindungan sosial berpengaruh terhadap status kemiskinan kepala rumah tangga perempuan. Perempuan yang tidak memiliki akses perlindungan sosial diduga akan berpeluang lebih besar memiliki status miskin dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki akses perlindungan sosial.